



PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA

(THE REDISCOVERY OF OUR REVOLUTION)

KEMENTERIAN PENERANGAN R. I.

PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA

(THE REDISCOVERY OF OUR REVOLUTION)

**Pidato Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1959**

KEMENTERIAN PENERANGAN R.I.

Saudara-Saudara sekalian !

Hari ini adalah „Hari 17 Agustus”.

17 Agustus 1959.

17 Agustus, — tepat empatbelas tahun sesudah kita mengadakan Proklamasi.

Saja berdiri dihadapan saudara-saudara, dan berbitjara kepada saudara-saudara diseluruh tanah-air, bahkan djuga kepada saudara-saudara bangsa Indonesia jang berada diluar tanah-air, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara memperingati, merajakan, mengagungkan, mengtjamkan Proklamasi kita jang keramat itu.

Dengan tegas saja katakan „mengtjamkan”. Sebab, hari ulang-tahun ke-empatbelas daripada Proklamasi kita itu harus benar-benar membuka halaman baru dalam sedjarah Revolusi kita, halaman baru dalam sedjarah Perdjoangan Nasional kita.

1959 menduduki tempat jang istimewa dalam sedjarah Revolusi kita itu. Tempat jang *unik* ! Ada tahun jang saja namakan „tahun ketentuan”, — a year of decision. Ada tahun jang saja sebut „tahun tantangan”, — a year of challenge. Istimewa tahun jang lalu saja namakan „tahun tantangan”. Tetapi buat tahun 1959 saja akan beri sebutan lain. Tahun 1959 adalah tahun dalam mana kita, — sesudah pengalaman pahit hampir sepuluh tahun —, kembali kepada Undang-Undang-Dasar 1945, — Undang-Undang-Dasar Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun dalam mana kita *kembali* kepada djiwa Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun *penemuan-kembali* Revolusi. Tahun 1959 adalah tahun ”Rediscovery of our Revolution”.

Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat jang istimewa dalam sedjarah Perdjoangan Nasional kita, satu tempat jang unik !

Seringkali telah saja djelaskan tentang tingkatan-tingkatan Revolusi kita ini.

1945 — 1950. Tingkatan physical Revolution. Dalam tingkatan ini kita merebut dan mempertahankan apa jang kita rebut itu, jaitu kekuasaan, dari tangannja fihak imperialis, kedalam tangan kita sendiri. Kita merebut dan mempertahankan kekuasaan itu dengan segenap tenaga rochaniah dan djasmaniah jang ada pada kita, — dengan apinja kitapunja djiwa dan dengan apinja kita-punja bedil dan meriam. Angkasa Indonesia pada waktu itu adalah laksana angkasa kobong, bumi Indonesia laksana bumi tersiram api. Oleh karena itu maka periode 1945 — 1950 adalah periode Revolusi phisik. Periode ini, periode merebut dan mempertahankan kekuasaan, adalah periode Revolusi *politik*.

1950 — 1955. Tingkatan ini saja namakan tingkatan "survival". Survival artinja *tetap hidup, tidak mati*. Lima tahun physical revolution tidak membuat kita rebah, lima tahun bertempur, menderita, berkorban-badaniah, lapar, kedjar-kedjaran dengan maut, tidak membuat kita binasa. Badan penuh dengan luka-luka, tetapi kita tetap berdiri. Dan antara 1950 — 1955 kita sembuhkanlah luka-luka itu, kita sulami mana jang bolong, kita tutup mana jang djebol. Dan dalam tahun 1955 kita dapat berkata, bahwa tertebuslah segala penderitaan jang kita alami dalam periodenja Revolusi phisik.

1956. Mulai dengan tahun ini kita ingin memasuki satu periode baru. Kita ingin memasuki periodenja Revolusi *sosial-ekonomis*, untuk mentjapai tudjuan terachir daripada Revolusi kita, jaitu satu masyarakat adil dan makmur, „tata-tentrem-kerta-rahardja". Tidakkah demikian, saudara-saudara? Kita berrevolusi, kita ber-djoang, kita berkorban, kita berdansa dengan maut, toh bukan *hanja* untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih, bukan *hanja* untuk melepaskan Sang Garuda Indonesia terbang diangkasa? „Kita bergerak", — demikian saja tuliskan dalam risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka" hampir tigapuluh tahun jang lalu —: „Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup lebih lajak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena "ideaal" sadja, kita bergerak karena ingin tjukup makanan, ingin tjukup pakaian, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup meminum seni dan cultuur,

— pendek kata kita bergerak karena ingin perbaikan nasib didalam segala bagian-bagiannya dan tjabang-tjabangnya. Perbaikan nasib ini hanjalah bisa datang seratus procent, bilamana masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab stelsel inilah yang sebagai kempladean tumbuh diatas tubuh kita, hidup dan subur daripada tenaga kita, rezeki kita, zat-zatnya masyarakat kita. — Oleh karena itu, maka pergerakan kita djanganlah pergerakan yang ketjil-ketjilan. — Pergerakan kita itu haruslah suatu pergerakan yang ingin merobah samasekali sifatnya masyarakat”

Pendek-kata, dari dulu-mula tudjuan kita ialah satu masyarakat yang adil dan makmur.

Masyarakat yang demikian itu tidak djatuh begitu-sadja dari langit, laksana embun diwaktu malam. Masyarakat yang demikian itu harus kita perdjoangkan, masyarakat yang demikian itu harus kita *bangun*. Sedjak tahun 1956 kita ingin memasuki alam pembangunan. Alam pembangunan Semesta. Dan saudara-saudara telah sering mendengar dari mulut saja, bahwa untuk pembangunan Semesta itu kita harus mengadakan perbekalan-perbekalan dan peralatan-peralatan lebih dahulu, — dalam bahasa asingnya: mengadakan “investment-investment” lebih dahulu. Sedjak tahun 1956 mulailah periode investment. Dan sesudah periode investment itu selesai, mulailah periode pembangunan besar-besaran. Dan sesudah pembangunan besar-besaran itu, mengalamilah kita Insja-Allah subhanahu wa ta’ala alamnya masyarakat adil dan makmur, alamnya masyarakat „murah sandang murah pangan”, „subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku”.

Saudara-Saudara! Djika kita menengok kebelakang, maka tampaklah dengan djelas, bahwa dalam tingkatan Revolusi phisik, segala perbuatan kita dan segala tekad kita mempunyai *dasar dan tudjuan yang tegas-djelas buat kita-semua*: melenjapkan kekuasaan Belanda dari bumi Indonesia, menjhahkan bendera tiga-warna dari bumi Indonesia. Pada satu detik, djam sepuluh pagi, tanggal 17 Agustus, tahun 1945, Proklamasi diutjapkan, — tetapi lima tahun lamanja Djiwa Proklamasi itu tetap berkobar-kobar, tetap berapi-api, tetap murni mendjiwai segenap fikiran dan rasa kita, tetap murni menghikmati segenap tindak-tanduk kita, tetap murni

mewahjui segenap keichlasan dan kerelaan kita untuk menderita dan berkorban. Undang-Undang-Dasar 1945, — Undang-Undang Dasar Proklamasi —, benar-benar ternjata Undang-Undang-Dasar *Perdjoangan*, benar-benar ternjata satu *pelopor* daripada *alat-perdjoangan* ! Dengan Djiwa Proklamasi dan dengan Undang-Undang-Dasar Proklamasi itu, perdjoangan berdjalan pesat, malah perdjoangan berdjalan laksana lawine jang makin lama makin gemuruh dan ta' tertahan, menjapu bersih segala penghalang !

Padahal lihat! Alat-alat jang berupa *perbendaan* (materiil) pada waktu itu serba kurang, serba sederhana, serba dibawah minimum ! Keuangan tambal-sulam, Angkatan Perang tjompang-tjamping, kekuasaan politik djatuh-bangun, daerah de facto Republik Indonesia kadang-kadang hanja seperti selebar pajung. Tetapi Djiwa Proklamasi dan Undang-Undang-Dasar Proklamasi mengikat dan membakar semangat seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ! Itulah sebabnja kita pada waktu itu pantang mundur. Itulah sebabnja kita pada waktu itu achirnja menang. Itulah sebabnja kita pada waktu itu achirnja berhasil pengakuan kedaulatan, — bukan *souvereiniteits-overdracht* tetapi *souvereiniteits-erkenning* —, pada tanggal 27 Desember 1949.

Demikianlah gilang-gemilangnja periode Revolusi phisik.

Dalam periode jang kemudian, jaitu dalam periode survival, sedjak 1950, maka modal perdjoangan dalam arti *perbendaan* (materiil) agak lebih besar daripada sebelumnja. Keuangan kita lebih longgar, Angkatan Perang kita tidak tjompang-tjamping lagi; kekuasaan politik kita diakui oleh sebagian besar dunia internasional; kekuasaan de facto kita melebar sampai daerah dimuka pintu-gerbang Irian Barat. Tetapi dalam arti *modal mental*, maka modal-perdjoangan kita itu mengalami satu *kemunduran*. Apa sebab?

Pertama oleh karena djiwa, sesudah berachirnja sesuatu perdjoangan phisik, selalu mengalami satu kekendoran; *kedua* oleh karena pengakuan kedaulatan itu kita beli dengan berbagai matjam *kompromis*.

Kompromis, tidak hanya dalam arti penebusan dengan *kekajaian materiil*, tetapi *lebih djahat daripada itu*: kompromis dalam arti *mengorbankan Djiwa Revolusi*, dengan segala akibat daripada itu:

Dengan Belanda, melalui K.M.B., kita harus mentjairkan djiwa-revolusi kita; di Indonesia sendiri, kita harus berkompromis dengan golongan-golongan yang non-revolusioner: golongan-golongan blandis, golongan-golongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra-revolusioner, golongan-golongan bunglon dan tjutjungk. Sampai-sampai kita, dalam mengorbankan djiwa revolusi ini, meninggalkan Undang-Undang-Dasar 1945 sebagai alat-perdjoangan!

Saja tidak mentjela K.M.B. sebagai *taktik* perdjoangan. Saja sendiri dulu mengguratkan apa yang saja namakan „*tracée baru*” untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Tetapi saja tidak menjetudjui orang yang *tidak menjadari adanja bahaja-bahaja* penghalang Revolusi yang timbul sebagai akibat daripada kompromis K.M.B. itu. Apalagi orang yang tidak menjadari *bahwa* K.M.B. *adalah* satu kompromis! Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang pernah saja namakan orang-orang possibilis, orang-orang yang pada hakekatnja tidak dinamis-revolusioner, bahkan mungkin kontra-revolusioner. Orang-orang yang demikian itu sedikitnja adalah orang-orang yang *beku*, orang-orang yang tidak mengarti maknanja „taktik”, orang-orang yang mentjampur-bawurkan *taktik* dan *tudjuan*, orang-orang yang djiwanja „mandek”.

Orang-orang yang demikian itulah, disamping sebab-sebab lain, meratjuni djiwa bangsa Indonesia sedjak 1950 dengan ratjunnja reformisme. Merekalah yang mendjadi salah satu sebab kemunduran *modal mental* daripada Revolusi kita sedjak 1950, meskipun dilapangan peralatan materiil kita mengalami sedikit kemajuan. Kalau tergantung daripada mereka, kita sekarang masih hidup dalam alam K.M.B.! Masih hidup dalam alam Uni Indonesia-Belanda! Masih hidup dalam alam supremasi modal Belanda!

Mereka berkata, bahwa kita harus selalu tunduk kepada perdjandjian internasional: Satu kali kita setudjui sesuatu perdjandjian internasional, sampai lebur-kiamat kita tidak boleh menjimpang

daripadanya! Mereka berkata, bahwa kita tidak boleh merobah negara federal á la van Mook, tidak boleh menghapuskan Uni, oleh karena kita telah menandatangani perdjandjian K.M.B. „Setia kepada aksara, setia kepada aksara!”, demikianlah wijshheid jang mereka keramatkan. Njatalah mereka sama sekali tidak mengarti apa jang dinamakan *Revolusi*. Njatalah mereka tidak mengarti bahwa Revolusi djustru mengingkari aksara! Dan njatalah mereka tidak mengarti, — oleh karena mereka memang tidak ahli revolusi —, bahwa modal-pokok bagi tiap-tiap revolusi nasional menentang imperialisme-kolonialisme ialah *Konsentrasi kekuatan nasional*, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional. Meskipun kita menjetudjui pemberian autonomi-daerah seluas-luasnya sesuai dengan motto kita Bhinneka Tunggal Ika, maka federalisme á la van Mook harus kita *tidak setiai*, harus kita kikis-habis selekas-lekasnya, oleh karena federalisme á la van Mook itu adalah pada hakekatnya alat pemetjah-belah kekuatan nasional. Djahatnja politik pemetjah-belahan ini ternjata sekali sedjak tahun 1950 itu, dan mentjapai klimaksnya dalam pemberontakan P.R.R.I.-Permesta dua tahun jang lalu, dan oleh karenanya harus kita gempur-hantjur habis-habisan, sampai hilang-lenjap P.R.R.I.-Permesta itu sama sekali!

Ja, sekali lagi: Persetudjuan internasional tidak berarti satu barang jang langgeng dan abadi. Ia harus memberi kemungkinan untuk setiap waktu menghadapi revisi. Apalagi, djika persetudjuan itu mengandung unsur-unsur jang bertentangan dengan keadilan-manusia, — dilapangan politikkah, dilapangan ekonomikah, dilapangan militerkah —, maka *wadjib* persetudjuan tersebut direvisi pada waktu perimbangan kekuatan berobah. Mitsalnya *pendjadjahan* terhadap bangsa lain, meski tadinja ia disetudjui dalam sesuatu perdjandjian internasional sekalipun, ta' dapat diterima sebagai suatu hukum jang mutlak dan abadi, jang harus dibenarkan terus-menerus sampai keachir zaman. Tidak!, ia harus ditjela setadjam-tadjamnya, ditentang mati-matian, ditiadakan selekas mungkin. Tidak boleh kita membiarkan langgeng dan abadi sesuatu hukum jang berdasarkan penguasaan silemah oleh sikuat.

Saudara-Saudara, saja masih dalam membitjarakan periode survival. Selama kita masih dalam periode survival ini, maka segala kompromis dan reformisme jang saja sebutkan tadi tidak begitu disadari akan akibatnja. Ja mungkin terasa kadang-kadang, bahwa djalannja pertumbuhan agak serat, tetapi keseratan ini makin lama makin diartikan sebagai satu kekurangan atau tjatjat jang memang melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, satu kekurangan atau tjatjat jang memang „inherent” kepada bangsa Indonesia sendiri, — bukan sebagai akibat daripada sesuatu kompromis, atau akibat sesuatu reformisme, atau akibat sesuatu possibilisme, pendek-kata bukan sebagai akibat pengorbanan djiwa Revolusi. Segala kemacetan dan keseratan di „verklaar” dengan kata „memang kita ini belum tjukup matang, memang kita ini masih sedikit Inlander”. Sinisme lantas timbul! Kepertjajaan kepada kemampuan bangsa sendiri gojang. Djiwa inlander jang memandang rendah kepada bangsa sendiri dan memandang agung kepada bangsa asing muntjul disana-sini, terutama sekali dikalangan kaum intelektual. Padahal semuanja sebenarnja adalah akibat daripada kompromis!

Masuk kita kedalam periode investment. Didalam periode inilah, — periode voorbereidingnja revolusi sosial-ekonomis —, makin tampaklah akibat-akibat-djelek daripada kompromis 1949 itu. Terasalah oleh seluruh masjarakat — ketjuali masjarakatnya orang-orang pemakan angka tanpa terkena getahnja angka, masjarakatnya orang-orang jang „arrivés”, masjarakatnya sipemimpin mobil sedan dan sipemimpin penggaruk lisensi —, terasalah oleh seluruh Rakjat bahwa djiwa, dasar, dan tudjuan Revolusi jang kita mulai dalam tahun 1945 itu kini dihinggapi oleh penjakit-penjakit dan dualisme-dualisme jang berbahaja sekali.

Dimana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta' ada apinja. Dimana Dasar Revolusi itu sekarang? Dasar Revolusi itu sekarang tidak keruan mana letaknja, oleh karena masing-masing partai menaruhkan dasarnja sendiri, sehingga dasar Pantja Sila pun sudah ada jang meninggalkan. Dimana tudjuan Revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, — jaitu masjarakat jang adil dan makmur —, kini oleh orang-orang jang bukan putera-revolusi diganti dengan politik libe-

ral dan ekonomi liberal. Diganti dengan *politik* liberal, dimana suara rakjat-banjak dieksploatir, ditjatut, dikorrupt oleh berbagai golongan. Diganti dengan *ekonomi* liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan Rakjat.

Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode investment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpinan Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah?; dualisme „Revolusi sudah selesaikah” atau „Revolusi belum selesaikah?”; dualisme dalam demokrasi, — demokrasi untuk Rakjatkah, atau Rakjat untuk demokraskah?

Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan investment itu, tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan-kekurangan atau ketololan-ketololan jang inhaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, — tidak! —, segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokoknja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sadar atau tidak sadar, telah *menjelèwèng* dari *Djiwa*, dari *Dasar*, dan dari *Tudjuan* Revolusi!

Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kitapunja *Djiwa* sendiri!

Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini.

Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan-keluar, memikirkan mentjari way-out, — think and re-think, make and re-make, shape and reshape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus! Beranilah membuang apa jang harus dibuang, beranilah membentuk apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang ta' tepat, — alat-alat materiil dan alat-alat mental —, beranilah

membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perdoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan "retooling for the future". Pendek-kata, beranilah meninggalkan alam-perdoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali samasekali kepada Djiwa Revolusi 1945.

Dihadapan Konstituante, dalam tahun 1956, tatkala saja membuka sidang pertama Konstituante itu, sudah saja mulai memberikan peringatan kearah itu. Dengan djelas saja katakan kepada Konstituante pada waktu itu: „Buatlah Undang-Undang-Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Proklamasi, buatlah Undang-Undang-Dasar jang tjotjok dengan Djiwa Revolusi". Pada Konstituante itu pada hakekatnja saja meminta satu ketegasan, satu keberanian, satu kemampuan-fantasi. Satu keberanian dan kemampuan-fantasi untuk meninggalkan samasekali alam-fikiran jang lama, memasuki samasekali satu alam-fikiran jang baru. Satu keberanian dan kemampuan-fantasi jang *revolusioner*. Sebab seluruh Rakjat merasa bahwa Undang-Undang-Dasar 1950 menekan djiwa Revolusi, menghambat-mengendorkan djalannja arus Revolusi, mematikan tjara-berfikir revolusioner, memberikan bumi-subur kepada tumbuhnja segala matjam aliran konvensional dan konservatif. Padahal, dengan tandas saja peringatkan kepada Konstituante, bahwa "The Constitution is made for men, and not men for the Constitution", — Konstitusi dibuat untuk mengabdi kepada manusia, dan tidak manusia dibuat untuk mengabdi Konstitusi.

Saja tadinja benar-benar mengharap, jang Konstituante mampu menjelesaikan soal ini. Dan tadinja benar-benar saja bermaksud memberikan satu tempat jang luhur-agung kepada Konstituante dalam Sedjarahnja Revolusi kita ini. Satu tempat luhur-agung, dimana Konstituante ternjata mendjadi *penjelamat Revolusi*.

Tetapi apa kenjataanja? Konstituante ternjata ta' mampu menjelesaikan soal jang dihadapinja, Konstituante ternjata ta' mampu mendjadi *penjelamat Revolusi*. Maka karena kegagalan Konstituante itu, demi kepentingan Nusa dan Bangsa, demi keselamatan Revolusi, saja pada tanggal 5 Djuli jang lalu mengeluarkan Dekrit jang berbunji:

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintang pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas;

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,**

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di: Djakarta

pada tanggal: 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,
SUKARNO.

Ja, saudara-saudara!, — melalui „tahun ketentuan” (year of decision), melalui „tahun tantangan” (year of challenge), kita sekarang tiba kembali kepada dasar perdjongan kita jang asli. Kita sekarang telah „menemukan-kembali Revolusi kita”, — kita sekarang telah tiba kepada ”rediscovery of our Revolution”.

Apa artinja ini?

Apakah ini berarti semata-mata pergantian Undang-undang Dasar 1950 dengan Undang-undang Dasar 1945? Tidak!

Apakah ini berarti semata-mata supaja kita „naik semangat” atau naik tekad”? Tidak!

Apakah ini berarti semata-mata bahwa kita mentjari perfeksi-teknis dan efisiensi-teknis dalam pekerdjaan dan usaha kita? Tidak!

Sekali lagi tidak! Kita tidak sekadar mentjari perobahan atau perbaikan lahir, kita tidak sekadar mentjari „naiknja semangat”. Perobahan lahir setiap waktu bisa luntur, dan semangatpun setiap waktu bisa luntur! Kita mentjari perobahan jang lebih dalam daripada itu! Kita mentjari kesedaran jang sedalam-dalamnja, — kesedaran jang masuk tulang, masuk sungsum, masuk fikiran, masuk rasa, masuk roch, masuk djiwa, — *bahwa kita tadinja telah njelèwèng dari dasar dan tudjuan perdjongan kita.* Kita mentjari

kesedaran jang sedalam-dalamnja, bahwa sifat-hakekat Revolusi kita ini *tidak bisa lain, tidak bisa lain*, daripada dasar dan tudjuan jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945!

Perubahan-perubahan batin, kesedaran tentang penjelèwèngan ini, dengan sendirinja nanti akan membawa perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dialam lahir.

Sekarang hai Bangsa Indonesia, bangkitlah kembali! Bangkitlah kembali dengan Djiwa Proklamasi didalam kalbu! Tinggalkan alam jang lampau! Tetapi djangan mengeluh! Keluh adalah tanda kelelahan djiwa. Ja, alam jang lampau memang salah. Alam jang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan-waktu sepuluh tahun lamanja. Tetapi djangan mengeluh! Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini *sadar*, dan berdjalanlah terus!

Djikalau kita mempeladjadi revolusi-revolusi bangsa lain, maka selalu kita melihat penjelèwèngan-penjelèwèngan. Ada jang penjelèwèngannja sementara, ada jang penjelèwèngannja terus-menerus. Penjelèwèngan sementara kemudian dikoreksi, tetapi penjelèwèngan terus-menerus menjejabkan dekadensi. Penjelèwèngan terus-menerus inilah jang berbahaja. Ia kadang-kadang membuat Revolusi itu kandas dan mati samasekali, atau ia menumbuhkan dekadensi jang berpuluh-puluh tahun lamanja, dan ini menjejabkan mengamuknja suatu revolusi baru. Revolusi Perantjis pada hakekatnja kandas dan mati oleh penjelèwèngan terus-menerus, revolusi Sun Yat Sen diselèwèngkan terus-menerus oleh Kuo Min Tang mendjadi satu kontra-revolusi.

Bagaimana dengan penjelèwèngan kita? Kita sangat bersjukur kepada Tuhan, bahwa penjelèwèngan kita itu *belum sampai mendjelma sebagai satu dekadensi*. Tepat pada waktunja, kita terperandjat sadar, dan kita mengadakan koreksi. Tepat pada waktunja, kita mendjalankan think and re-think, dan kita melihat penjelèwèngan itu, dan kita bongkar penjelèwèngan itu, dan kita banting stir kembali kedjalan jang benar. Tepat pada waktunja, rakjat-djelata memukul tjanang. Tepat pada waktunja, si Marhaen dan si Sarinah, si Dadap dan si Waru, berteriak: „Hai pemimpin! Engkau njelèwèng! Engkau njelèwèng!” Memang sebagai saja katakan tempohari, kesadaran-sosial dan kesadaran-politik Rakjat

Indonesia, djikalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, boleh dibanggakan. Sociaal-bewustzijnja dan politiek-bewustzijnja adalah tidak kalah dengan banjak bangsa-bangsa lain. Dan memang Revolusi kita adalah satu Revolusi-Rakjat. Revolusi kita bukan satu revolusi-istana, bukan satu "palace-revolution", — bukan satu revolusi jang oleh seorang penulis bangsa asing dinamakan satu "revolution which is the prelude of the pre-revolutionary days".

Peringatan ini baik sekali didengarkan oleh orang-orang jang menjebutkan dirinja pemimpin. Kalau mereka memimpin, maka ketahuilah, bahwa jang mereka pimpin itu bukan satu rombongan kambing atau satu rombongan bèbèk atau satu rombongan tujul, tetapi satu Rakjat jang kesedaran-sosialnja dan kesedaran-politiknya telah tinggi!

Berkat kesedaran-sosial dan kesedaran-politik Rakjat kita itulah, maka penjelèwèngan kita tidak berlangsung amat lama. Dua-tiga tahun sadja sesudah kita merasakan bahwa pertumbuhan atau kemajuan kurang lantjar, Rakjat-djelata telah memukul tjanang! Dua-tiga tahun sadja kematjetan, maka kita segera mampu menemukan sebab-sebab dan akar-akar daripada kematjetan itu, dan kita bongkar sebab-sebab dan akar-akar itu, dan kita adakan koreksi-koreksi seperlunja, djuga koreksi-koreksi jang radikal dan fundamental.

Karena itu, djangan mengeluh! Tetaplah berdjalan terus, tanpa mandek, tanpa ragu-ragu, diatas relnja Revolusi kita jang asli.

Djangan ada diantara kita jang meragu-ragukan kebenaran relnja Revolusi kita itu. Djangan ada diantara kita jang berkata, bahwa dasar dan tudjuan Revolusi kita toh boleh djuga berobah?

Ada memang orang peragu, ada memang orang defaitis, jang menjebutkan dirinja „ahli falsafah”, jang dengan dalil bahwa tidak ada barang sesuatu jang langgeng dan ta' berobah, — "panta rei" dalil mereka —, menanja apakah dasar dan tudjuan Revolusi kita ini tidak boleh djuga dan tidak bisa djuga berobah? Apakah keadilan sosial tidak boleh ditawar-tawar lagi? Apakah perdjoangan anti kolonialisme tidak boleh dimodulir lagi? Apakah hal jang kita niatkan pada tanggal 17 Agustus '45 itu tidak boleh diamendir lagi?

Pertanyaan-pertanyaan jang demikian inipun satu penjelèwengan! Bahkan satu penjelèwengan jang sangat serius, akibat daripada satu djiwa kompromis.

Dalam perikehidupan kemanusiaan didunia ini adalah beberapa kebenaran, — beberapa waarheden — jang langgeng dan ta' berobah. Waarheden jang demikian itu ta' boleh ditawarkan atau dimodulir atau diamendir, tanpa merobah ia dari waarheid mendjadi satu kepalsuan. Ia ta' boleh ditinggalkan, tanpa membuat manusia mendjadi machluk jang kehilangan kemudi.

Ambillah misalnja pokok-isi „Declaration of Independence” Amerika, dan Manifes Komunis, — dua dokumen jang menurut Bertrand Russell telah membagi dunia-manusia ini mendjadi dua golongan jang terpisah satu sama lain. Baik Declaration of Independence, maupun Manifes Komunis, kedua-duanja berisi beberapa kebenaran (waarheden) jang tetap benar, tetap laku, tetap valid selama-lamanja. Siapa, — kalau benar-benar ia Manusia, dan bukan machluk tanpa arah —, berani mentjoba mengamendir kebenarannya kalimat dalam Declaration of Independence, bahwa „semua manusia dilahirkan sama, dan bahwa tiap-tiap manusia itu diberi oleh Tuhan beberapa hak jang ta' dapat dirampas, jaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengedjar kebahagiaan”, — “That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness”?.....

Siapa, — kalau benar-benar ia Manusia, dan bukan machluk tanpa arah —, berani membantah kebenarannya benang-merah dalam Manifes Komunis, bahwa sebagian besar dari ummat manusia ini ditindas, di „onderdrukt” dan di „uitgebuut” oleh sebagian jang lain, sehingga achirnja „kaum proletar ta' akan kehilangan barang lain daripada rantai-belenggunja sendiri. Mereka sebaliknya akan memperoleh satu dunia baru. Hai Proletar seluruh dunia, bersatulah”?.....

Kalimat-kalimat atau inti-sari fikiran jang demikian itu mengandung kebenaran-kebenaran jang ta' boleh diragu-ragukan atau diamendir. Dasar-djiwanja ialah Budi-Kemanusiaan, Hati-Nurani Kemanusiaan, — Het Geweten van den mens, The Conscience of

Man. Dasar-djiwanja mengenai wilajah seluruh perhubungan antara manusia dengan manusia. Ia bukan piagam jang hanja mengenai satu bangsa sadja, seperti misalnja Magna Chartanja orang Ingggris. Ia bukan pakta antara beberapa negara jang berkuasa sadja, seperti misalnja Atlantic Charter. Ia bukan satu dasar untuk menjusun sesuatu Pax daripada sesuatu negara, seperti Pax Britannica, atau Pax Romana, atau Pax Americana, atau Pax Sovietica, tidak!, — ia adalah satu dasar untuk menjusun Pax jang meliputi seluruh Kemanusiaan, jaitu Pax *Humanica*, Pax-nja seluruh machluk-manusia jang mendiami bumi ini.

Di Washington tiga tahun jang lalu saja mengandjurkan Pax *Humanica* atas dasar Declaration of Independence itu, di Moskow saja dasarkan Pax *Humanica* atas beberapa kalimat Manifesto Komunis.

Manusia itu dimana-mana sama. Kemanusiaan adalah satu. "Mankind is one", demikianlah saja katakan dimana-mana pada waktu saja melanglang buana, di Barat atau di Timur, di Utara atau di Selatan, didelapan pendjuru daripada dunia. Budi-Kemanusiaan, Hati-Nurani Kemanusiaan, the Social Conscience of Man, menjerapi djiwa semua machluk-manusia diseluruh muka bumi. Dan Social Conscience ini ta' berobah-robah, ta' mau diamendir, ta' mau dimodulir.

Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia adalah *kongruèn* dengan Social Conscience of Man itu! Keadilan sosial, Kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, dan lain sebagainya itu, adalah pengedja-wantahan daripada Social Conscience of Man itu. Keadilan sosial dan kemerdekaan adalah tuntutan budi-nurani jang universil. Karena itu, djanganlah ada diantara kita jang mau mengamendir atau memodulir dasar dan tudjuan Revolusi kita itu!

Saja telah mengundjungi sebagian besar dari dunia ini. Sebelum itu, sudah lama saja berkejakinan, bahwa kesedaran sosial (social consciousness) daripada rakjat-rakjat dimuka bumi ini adalah sama, dimanapun mereka berada. Dan kejakinan saja ini diperdalam oleh apa jang saja lihat dalam perdjalanan-perdjalanan saja keluar negeri itu, antara lain kenegara-negara di Latin Amerika. Apa jang saja lihat?

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini, tidak mau ditindas oleh bangsa lain, tidak mau dieksploaitir oleh golongan-golongan apapun, meskipun golongan itu adalah dari bangsanja sendiri.

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa-takut, baik jang karena antjaman didalam-negeri, maupun jang karena antjaman dari luar-negeri.

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk menggerakkan setjara konstruktif iapunja aktivitet-sosial, untuk mempertinggi kebahagiaan individu dan kebahagiaan masjarakat.

Rakjat dimana-mana dibawah kolong langit ini menuntut kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, jaitu menuntut hak-hak jang lazimnja dinamakan demokrasi.

Itulah kejakinan saja dari dulu, dan itulah pula jang saja lihat dimana-mana. Tuntutan-tuntutan ini keluarnja seperti meledak dalam abad keduapuluh, tetapi sebenarnja ia telah terkandung berabad-abad dalam kalbu, oleh karena tuntutan-tuntutan itu pada hakekatnja adalah ta' lain ta' bukan pengedja-wantahan daripada „Budi-Nurani Kemanusiaan”, pengedja-wantahan daripada "Conscience of man".

Berabad-abad ia terbenam latent. Berabad-abad ia „mulek” dalam budi-pekerti manusia, seperti api didalam sekam. Achirnja ia meledak, achirnja ia meledak setjara revolusioner, — achirnja ia meledak setjara historis-revolusioner. Sekaligus ia muntah-keluar sebagai tuntutan massal jang berbareng, sekaligus ia mendjadi tuntutan jang simultan. Ta' dapat lagi ia dilajani setjara liter per liter, atau dipenuhi setjara kilo per kilo. Ta' dapat lagi ia diladeni dengan tjara-tjara jang reformistis, ta' dapat lagi ia ditanggulangi setjara "piece-meal". Tuntutan-tuntutan simultan jang mbludak keluar setjara historis-revolusioner itu harus dilajani dengan tjara-tjara jang djuga mbludak revolusioner.

Tuntutan-tuntutan Rakjat Indonesia adalah demikian djugalah !
Tuntutan-tuntutan mengenai keadilan sosial, tuntutan kemerdekaan

dan kebebasan, tuntutan demokrasi, dan lain-lain sebagainya itu, telah mbludak keluar setjara revolusioner dalam masa generasi kita sesudah mulek berpuluh-puluh tahun dalam kalbu kita laksana api dalam sekam, — dan tuntutan-tuntutan Rakjat Indonesia inipun harus dilajani setjara mbludak revolusioner. Tidak mungkin lagi ia dilajani liter per liter, tidak mungkin lagi kilo per kilo. Tidak mungkin setjara réformis, tidak mungkin setjara piece-meal. Tidak mungkin setjara kompromis. Dan untuk melajani setjara mbludak revolusioner tuntutan-tuntutan itu, kita sendiri harus berdjiwa revolusioner. Itulah pula salah satu sebab kita kembali kepada Undang-Undang-Dasar Proklamasi.

Sekarang, sesudah kita memasuki lagi Djiwa Revolusi, dengan Undang-Undang-Dasar '45 sebagai dasar ketatanegaraan, apakah selandjutnja jang akan kita hadapi, apakah selandjutnja jang harus kita perbuat?

Sebelum mendjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita mengadakan *stock-opname* lebih dahulu daripada *modal-nasional* kita pada ini waktu, jang dapat kita pakai sebagai bahan dan alat-perdjoangan.

Apa jang kini kita miliki?

Pertama. Undang-undang-Dasar 1945 dan Djiwa Revolusi 1945. Djiwa ini tidak lahir-kembali begitu-sadja dengan Dekrit 5 Djuli, tetapi masih harus kita pupuk-terus dan kita perembangkan-terus, kita kobar-kobarkan-terus dan kita gempagelorakan-terus, terutama sekali dengan intensifikasi djiwa-berkorban, baik mental maupun materiil.

Kedua. Hasil daripada segala fikiran dan keringat Rakjat sedjak 1945 hingga sekarang, jang berupa hasil-hasil materiil, maupun jang berupa tenaga-tenaga baru, kader-kader baru, dan lain sebagainya, dalam segala lapangan.

Ketiga. Makin bertumbuhnja kekuatan ekonomi jang mendjadi milik nasional atau dibawah pengawasan nasional, jang pada ini waktu sudah meliputi kurang-lebih 70% daripada seluruh kekuatan jang berada di Indonesia.

Keempat. Angkatan Perang jang makin lama makin kuat, administrasi pemerintahan jang makin lama makin baik.

Kelima. Wilayah-kekuasaan Republik Indonesia jang kompak unitaristis dan amat luas, dan jang letaknja amat strategis dalam politik dan ekonomi dunia, serta djumlah Rakjat (manpower) jang kini sudah 88.000.000, tetapi terus bertambah pesat, sehingga dalam waktu singkat Indonesia akan mempunjai manpower jang 100.000.000, 120.000.000, 150.000.000, orang!

Keenam. Kepertjajaan pada kemampuan dan keuletan bangsa sendiri, jang sudah dibuktikan dizaman jang lampau, djuga djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi bangsa lain jang sedang berdjalan sekarang, ja, djuga djika dibandingkan dengan revolusi-revolusi dinegeri-negeri luaran jang sekarang sudah selesai.

Ketujuh. Kekajaan alam, kekajaan diatas bumi dan kekajaan didalam bumi, jang sungguh saja tidak omong-kosong ta' ada bandinganja diseluruh dunia ini, ta' ada tandingannja didelapan pendjuru angin.

Maka *Tujuh hal* inilah, — dan dapat ditambah dengan beberapa hal lagi —, mendjadi modal kita untuk melandjutkan perdjoangan, mendjadi kereta kita untuk melandjutkan perdjalan.

Tidakkah modal-modal ini menggembirakan? Tidakkah ia tjukup besar untuk membuat hati kita mongkok sebesar gunung, untuk membanting-tulang terus, memeras keringat terus, berdjalan mendaki terus, ja berdjalan mendaki terus!, sampai tudjuan tertjapai, meski ada rintangan jang bagaimanapun djuga?

Lihat misalnja modal jang *kelima*, — modal jang mengenai wilayah-kekuasaan Indonesia! Zonder Irian Barat sadja Republik Indonesia telah berwilajah kekuasaan jang luasnja sama dengan dari pantai Barat Eropa sampai ketopal-batasnja disebelah Timur, lebih luas daripada wilayah negara-negara besar, dan kedudukan strategisnjapun ta' ada taranja dimuka bumi. Dan wilayah-kekuasaan Republik Indonesia jang begitu luas ini *tidak terbagi-bagi dalam beberapa negara!* Inipun hasil perdjoangan jang pantas kita banggakan, terutama sekali djika dibandingkan dengan perdjoangan

bangsa-bangsa lain disekitar kita ini. Wilayah mereka terbagi-bagi, wilayah kita tidak. Bangsa mereka terbagi-bagi, bangsa kita tidak. Djiwa mereka terbagi-bagi, djiwa kita tidak. Malahan kita akan memperbesar wilayah-kekuasaan kita' itu, dengan memasukkan kembali Irian Barat! Malahan kita akan mempersatukan kembali Bangsa Indonesia itu, dengan membebaskan Irian Barat. Malahan kita akan mengutuhkan kembali djiwa Indonesia itu, dengan memerdekakan Irian Barat. Dunia-luaran harus tahu, bahwa mengenai pembebasan Irian Barat itu kita tidak main-main dan tidak mengenal kompromis!

Dan dunia-luaran pun harus tahu, bahwa federalisme kaum penjelèwèng jang mereka simpatii dan mereka sokong gelap-gelapan itu akan terus kita tentang habis-habisan, kita tentang matiamian, oleh karena federalisme memetjah potensi bangsa Indonesia jang berkepribadian „Tunggal Ika”, dan oleh karena ia memang adalah alat imperialis dalam politiknya "divide et impera", alat imperialis untuk memetjah-metjah kekuatan kita. Kita kembali kepada Undang-Undang-Dasar 1945, antara lain oleh karena Undang-Undang-Dasar 1945 berdiri diatas dasar Unitarisme Negara, dan dus tidak mengizinkan federalisme di Indonesia dalam bentuk bagaimana djuga. Dengan tegas, djelas, tandas, dalam Bab I, fasal 1, ayat 1 daripada Undang-Undang-Dasar '45 itu ditulis: „Negara Indonesia ialah Negara *Kesatuan* jang berbentuk Republik”, — Kesatuan dengan aksara K besar! Siapa dalam rangka Undang-Undang-Dasar 1945 ini masih hendak mengandjur-andjurkan federalisme, siapa jang masih hendak bitjara tentang „negara bagian” dan lain sebagainya itu, ia dengan njata tidak berdiri diatas bidang Undang-Undang-Dasar Proklamasi, ia akan kita tentang dengan segala djiwa-perdjoangan jang ada didalam kalbu. Segenap barisan pentjinta Undang-Undang-Dasar Proklamasi siap-sedia untuk mengempur pertjobaan-pertjobaan untuk menjelinkan federalisme dalam tubuh ketatanegaraan kita itu!

Sekarang lihat djuga modal *keenam*: kemampuan dan keuletan bangsa kita jang sudah kita buktikan dizaman jang lampau. Itu-pun satu modal jang amat besar harganja! Sebab modal ini adalah

modal pengalaman, dan modal mental. Modal ini adalah modal jang berupa bukti-keuletan-dan-bukti-kemampuan bangsa kita, dan modal kepertjajaan. Modal „geloof”. Modal "faith". Amat penting-lah kepertjajaan ini! Kong Hu Tju berkata bahwa ta' ada satu bangsa dapat berdiri tegak tanpa kepertjajaan kepada diri sendiri, dan kenjataanja memang begitu.

Alangkah menta'djubkannya, keuletan dan kemampuan kita itu! Pada waktu saja memberi keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat beberapa minggu jang lalu, telah saja singgung tentang hal ini. „Djangan pula hanja melaksanakan program kabinet jang begitu sederhana itu!”, kataku dimuka Dewan Perwakilan Rakjat, — „pukulan-pukulan jang lebih hebat daripada itu, dimasa jang lampau, kita atasi!”

„Apakah kitapunja achievement jang terbesar didalam Revolusi kita ini, dimasa jang lampau?” tanjaku dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat. Bahwa kita sekarang mempunyai Angkatan Darat jang boleh dibanggakan? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunyai Angkatan Laut jang 10 kali besarnja daripada dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunyai Angkatan Udara jang 7 kali lebih kuat daripada dulu? Tidak! Bahwa kita sekarang mempunyai mata-keuangan sendiri? Tidak! Bahwa kita sekarang telah dapat membatja-dan-menulis 60%? Tidak! Achievement kita jang terbesar dalam Revolusi kita ini ialah, bahwa kita tetap *survive*, tetap *berdiri*, tetap *hidup*. Pukulan-pukulan apapun jang djatuh diatas tubuh kita dimasa jang lampau, — pukulan-pukulan jang mungkin telah meremuk-redamkan menghantjur-leburkan bangsa-bangsa lain jang kurang kuat —, kita toh tetap berdiri, kita toh tetap hidup, kita toh tetap survive. Dihantam dengan aksi militer jang pertama, — kita tetap survive.

Dihantam dengan aksi militer jang kedua, — kita tetap survive. Dihantam oleh federalisme van Mook jang hendak merobek-robek dada kita, — kita tetap survive. Dihantam oleh krisis ekonomi sebagai akibat pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda, tatkala lautan-lautan kita boleh dikatakan sunji-senjap karena bersih ditinggalkan oleh kapal-kapal K.P.M. — kita tetap survive. Dihantam oleh D.I.-T.I.I., dihantam oleh P.R.R.I.-Permesta dengan

bantuannya jaksa-jaksa djin-peri-perajangan dari luar, — kita tetap survive. Sungguh, achievement kita jang paling besar dalam Revolusi kita ini ialah bahwa kita tetap survive. Palu-godamnja kesulitan-kesulitan jang bagaimanapun djuga ta' mampu mematahkan kita, gempurannya krisis-krisis jang segelap-gelapnjapun djuga ta' mampu meremuk-redamkan kita. Njata kita ini bangsa jang tahan-udji. Njata kita ini bangsa jang besar kemampuan, Bangsa jang ulet, Bangsa jang vital!

Kenjataan ini hendaknya mendjadi modal-kepertjajaan kita untuk mampu menempuh perdjongan jang masih akan datang. Modal kepertjajaan jang begini ini amat tinggi harganja, — ta' dapat dinilai dengan berlian, ta' dapat dibeli dengan emas, ta' dapat ditukar dengan ratna mutu manikam. Ja, masih banjak kesulitan dihadapan kita, tetapi mari kita terdjang kesulitan-kesulitan itu. Bangsa lain barangkali akan mengkerut hatinja kalau melihat gunung-kesulitan dihadapannya, tetapi Bangsa kita tidak akan gentar, dan ia tetap mendaki terus. Insja Allah subhanahu wa ta'ala, Bangsa kita, mengingat pengalaman-pengalaman jang sudah-sudah, akan dapat menjelesaikan Revolusi ini setingkat demi setingkat, sampai tudjuan jang terachir tertjapai. Tudjuan djangka-pendek tertjapai, tudjuan djangka-pandjang pun tertjapai!

Apakah tudjuan kita djangka-pendek, dan apa tudjuan kita djangka-pandjang itu?

Tudjuan *djangka-pendek* jang saja hadapkan kepada saudara-saudara ialah: program Kabinet Kerdja jang amat sederhana itu, — sandang-pangan, keamanan, melandjutkan perdjongan anti-imperialisme —, ditambah dengan *mempertahankan kepribadian kita ditengah-tengah tarikan-tarikan kekanan dan kekiri*, jang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan-dunia menudju kepada satu imangan baru.

Dan tudjuan kita *djangka-pandjang* ialah: masjarakat jang adil dan makmur, melenjapkan imperialisme dimana-mana, dan mentjapai dasar-dasar bagi perdamaian-dunia jang kekal dan abadi. Maka untuk menanggulangi segala mas'alah-mas'alah berhubungan dengan tudjuan-tudjuan djangka-pendek dan djangka-pandjang

tersebut, njatalah kita ta' dapat mempergunakan sistim jang sudah-sudah dan alat-alat („tools”) jang sudah-sudah. Sistim liberalisme harus kita buang djauh-djauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus kita tempatkan sebagai gantinya. Susunan peralatan jang ternjata ta' efisien dulu itu, harus kita bongkar, kita ganti dengan susunan peralatan jang baru. *Ordering baru* dan *herordering baru* harus kita adakan, agar demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dapat berdjalan. Inilah arti dan isi perkataanku mengenai "retooling for the future", jang tempo hari saja utjapkan dimuka D.P.R.

Retooling daripada semua alat-alat-perdjoangan! Dan Konsolidasi daripada semua alat-alat-perdjoangan sesudah retooled!

Retooling badan eksekutif, jaitu Pemerintah, kepegawaian dan lain sebagainya, vertikal dan horizontal.

Retooling badan legislatif, jaitu D.P.R.

Retooling semua alat-alat-kekuasaan Negara, — Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi.

Retooling alat-alat produksi dan alat-alat distribusi.

Retooling organisasi-organisasi masyarakat, — partai-partai politik, badan-badan sosial, badan-badan ekonomi.

Ja, djaga-djagalalah, — semuanja akan diretool, semuanja akan diordering dan diherordering, dan memang ada jang sedang diretool.

Dibidang eksekutif retooling sedang berdjalan berangsur-angsur.

Dibidang legislatif saja harap retooling djuga didjalankan terus: siapa jang tidak bersumpah setia kepada Undang-Undang-Dasar 1945 dikeluarkan dari D.P.R.; siapa jang ikut pemberontakan, dipetjat dari D.P.R. dan akan dihukum. Siapa jang tidak mengarti apa makna „kembali kepada Undang-Undang-Dasar '45", sebenarnya sebaiknya ia keluar sadja dari D.P.R.!

D.P.R. hendaknja mendjadi satu tempat-perwakilan Rakjat jang bersifat baru. Bukan sadja ia menurut semangat Undang-Undang-Dasar '45 sekarang harus mendjadi dewan jang bantu-membantu dengan Pemerintah, — ia ta' dapat mendjatuhkan Pemerintah; jang dapat mendjatuhkan Pemerintah ialah Madjelis Permusja-

waratan Rakjat —, bukan sadja itu, tetapi dalam semangat kembali kepada Undang-Undang-Dasar 1945 itu, dalam semangat Demokrasi Terpimpin, dalam semangat membina masyarakat adil dan makmur, saja harap supaja gedung D.P.R. itu bukan lagi hanja satu tempat berbitjara télé-télé dan tempat pemungutan suara sadja, akan tetapi terutama sekali tempat dimana dilahirkan fikiran-fikiran, idee-idee, konsepsi-konsepsi, jang berguna dan bersedjarah bagi Rakjat.

Hanja dengan retooling-diri jang demikian itulah, D.P.R. akan dapat mendjadi alat-pembangunan, alat-perdjoangan, alat-Revolusi.

Dan alat-alat-kekuasaan Negara jang lain-lainjapun, — Angkatan Perang dan Polisi —, harus diretool. Dimasa jang lampau, liberalisme telah membawa banjak bentjana dalam alat-alat-kekuasaan Negara itu. Bapakisme, daerahisme, politik territorial sendiri-sendiri, dewan-dewan, P.R.R.I., Permesta, dan lain-lain borok dan koréng sematjam itu, pada hakekatnja semua beribu kepada liberalisme jang membolehkan setiap orang berbuat sakersa-kersanja sendiri, ketambahan lagi dengan kipasannja dan bantuannja subversi asing. Stop keadaan jang demikian itu! Kini alat-alat-kekuasaan Negara harus disapih samasekali dari liberalisme, kini merekapun bernaung dibawah bendera Undang-Undang-Dasar '45, kini mereka-pun harus didjadikan lagi alat-Revolusi.

Demikian pula alat-alat-produksi dan alat-alat-distribusi. Semuanya harus diretool! Semuanya harus direorganisasi, harus dibelokkan setirnja kearah pelaksanaan fasal 33 Undang-Undang-Dasar '45 dengan mempergunakan relnja demokrasi terpimpin. Misalnja, kita mempunjai beberapa badan jang diserahi oleh negara untuk mengurus dan mengembangkan beberapa bidang produksi dan distribusi, tetapi apa latjur? Bukan produksi dan distribusi itu mendjadi teratur-bèrès dan berkembang, tetapi badan-badan itu mendjadi sarangnja orang-orang jang memadet-madatkan isi-kantongnja sendiri, orang-orang jang mendjadi kaja-raja, orang-orang jang mendjadi miljuner!

„Daar moet een eind aan komen!” Keadaan jang demikian itu harus dirobah! Dan bukan sadja badan-badan itu harus diretool, tetapi djuga semua alat-alat vital dalam produksi dan semua alat-alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnja diawasi oleh

Pemerintah. Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa, oleh karena alat-alat-vital itu tidak dikuasai atau tidak diawasi Pemerintah, beberapa gelintir spekulasi atau beberapa gelintir profiteur dapat menggonggongkan seluruh ekonomi-nasional kita, mengkotjar-katjirkan seluruh kebutuhan Rakyat.

Dan organisasi-organisasi masyarakat pun harus diretool. Partai-partai politik harus diretool, badan-badan sosial harus diretool, badan-badan ekonomi harus diretool. Niat Kabinet Karya untuk mengadakan penjederhanaan kepartaian dan untuk mengadakan Undang-undang Pemilihan-Umum baru, saja teruskan. Penjederhanaan kepartaian dan pemilihan-umum setjara baru itu adalah retooling pula.

Saja ingin mengulangi beberapa kata jang saja utjapkan tanggal 24 Djuli jang baru lalu dimuka sidang D.P.R.:

„Saja telah mengadakan retooling dalam bidang eksekutif, dan sebagai tadi saja katakan, retooling harus kita teruskan disemua lapangan, baik lapangan ekonomi maupun lapangan politik maupun lapangan kemasjarakatan”.

Sekali lagi: retooling *disemua* lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retooling itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur jang tidak sesuai lagi dengan pikiran demokrasi terpimpin, dengan sarana-sarana baru, dengan alat-alat dan apparatur-apparatur baru, jang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti djuga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat jang masih dapat dipergunakan, asal sadja alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertadjam kembali.

Retooling dilapangan kemasjarakatan dalam arti jang paling pokok ialah menghimpun segala tenaga, segala kekuatan, segala sarana, jang kini sudah dan belum dipergunakan, menghimpun segala tenaga dan kekuatan jang resmi, setengah resmi dan jang sama sekali tidak resmi. Retooling berarti mobilisasi total, penghimpunan tenaga-tenaga materiil setjara total, menghimpun tenaga-tenaga rochaniah setjara total, dan membuat tenaga-tenaga itu strijdvaardig dan strijdwaardig buat melaksanakan tugas dan tanggung

djawab Kabinet Kerdja, jang pada hakekatnja merupakan program bagi Rakjat Indonesia seluruhnja.

Mobilisasi materiil dan mental setjara total itu tidak dapat kita hindari, kalau kita hendak sungguh-sungguh mendjawab tantangan jang sudah ditjantumkan dalam program Kabinet Kerdja. Amat perlu djuga ialah supaya kita bisa mengikut-sertakan segala modal dan tenaga, segala "funds and forces" bagi usaha-usaha pembangunan semesta kita. Tetapi dalam usaha-usaha mengorganisir dan menghimpun segala "funds and forces" itu, haruslah kita letakkan satu sjarat pokok, jaitu: *modal dan tenaga, jang hendak kita ikut-sertakan itu, haruslah bertjorak progressif*. Segala modal dan segala tenaga jang memenuhi sjarat itu akan kita sambut dengan kedua belah tangan. Sebaliknya "funds and forces" jang *tidak* progressif, tenaga-tenaga jang reaksioner dan anti-revolusioner, akan kita tolak dan malahan kita tentang. Tenaga-tenaga dan modal jang tidak memenuhi sjarat pokok kita itu, hendaknja minggir sadja, dan sekali-kali djanganlah menghalang-halangi kita. Sebab setiap penghalangan akan kita terdjang, setiap rintangan akan kita singkirkan, sesuai dengan sembojan „Rawé-rawé rantas, malang-malang putung”.

Sekali lagi, *segala* tenaga dan *segala* modal jang terbukti progressif akan kita adjak dan akan kita ikut-sertakan dalam pembangunan Indonesia. Dus djuga tenaga dan modal bukan-asli jang *sudah* menetap di Indonesia dan jang menjetudju, lagi pula sanggup membantu terlaksananja program Kabinet Kerdja, akan mendapat tempat dan kesempatan jang wadjar dalam usaha-usaha kita untuk memperbesar produksi dilapangan perindustrian dan pertanian. "Funds and forces" bukan-asli itu dapat disalurkan kearah pembangunan perindustrian, misalnja dalam sektor industri menengah, jang masih terbuka bagi inisiatip partikelir. Dalam hal ini maka kini waktunja sudah tiba, untuk mempeladjar dan menjusun peraturan khusus jang memuat sjarat-sjarat dan tjara-tjara mempergunakan "funds and forces" tersebut.

Untuk melaksanakan maksud itu maka perlu adanja *iklim kerdja sama jang baik*. Oleh karena itu semua jang berkepentingan

hendaknja mendjauhi sesuatu tindakan jang dapat merugikan iklim kerdjasama itu.

Saudara-saudara, kita dus harus mengadakan ordening dan her-
ordening *total* ! Memang Dekrit Presiden 5 Djuli itu pada hakekat-
nja adalah satu pukulan tjanang, satu "sein" untuk mengadakan
herordening *total*. „Tinggalkan samasekali alam liberalisme, ting-
galkan samasekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalis-
me itu, tinggalkan samasekali Undang-Undang-Dasar 1950, masuk-
lah samasekali dalam alam Revolusi lagi, pakailah Undang-Undang-
Dasar 1945 itu samasekali sebagai alat-perdjoangan, kibarkanlah
samasekali benderanja Demokrasi Terpimpin, — hiduplah sama-
sekali setjara baru, berdjoanglah samasekali setjara baru !”, —
demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman Dekrit Presiden
itu.

Ja, *baru*, disegala lapangan ! Ordening dan herordening *total* !
Herordening politik, herordening ekonomis, herordening sosial
dalam seluruh kehidupan bangsa. Herordening jang disertai dengan
koordinasi satu samalain, sehingga seluruh matjam aktivitet kehi-
dupan bangsa itu mendjadi "one coordinated unit", satu djarangan
jang terkoordinir, untuk memenuhi dasar dan tudjuan Revolusi.

Sebetulnja, dulu, Rakjat dalam berbagai lapisan atau berbagai
golongan, telah djuga mendjalankan aktivitet dilapangannja masing-
masing. Akan tetapi aktivitetnja itu tidak *terkoordinir* satu sama
lain, tidak *terkoordinir* diatas persadanja *satu dasar* dan *satu*
djurusan, — „satu buat semua, semua buat satu”, — *satu*, jaitu
Negara supaja mendjadi Negara Kesatuan jang kuat berwilajah
kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke, dan Masjarakat supaja
mendjadi masjarakat adil dan makmur jang memberi kebahagiaan
kepada semua warga negara diseluruh tanah-air. Dulu aktivitet
itu kadang-kadang bersimpang-siur, sehingga kadang-kadang aktivitet
satu golongan dilakukan atas kesengsaraannja atau kemelarattannja
golongan jang lain. Aktivitet jang bersimpang-siur ini malahan
tidak mendekatkan kita kepada tudjuan Revolusi, melainkan
malahan mendjauhkan kita dari tudjuan Revolusi !

Karena itu kita sekarang harus mengadakan herordening dan
koordinasi *total* !

Herordening *politik*. Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa Rakjat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terdjadi, bahwa Rakjat mendjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya, *demokrasi* harus mendjadi alat Rakjat. Alat Rakjat untuk mentjapai tudjuan Rakjat. Tudjuan Rakjat jang telah dikorbani oleh Rakjat berpuluh-puluh tahun, jaitu Negara kuat, masjarakat adil dan makmur. Demokrasi Terpimpin tidak menitik-beratkan kepada „satu orang = satu suara”, sehingga partai mendjadi sematjam „koeliewerver” di zaman Belanda, hanja sekarang werver suara, tetapi Demokrasi Terpimpin menitik-beratkan kepada :

- a. tiap-tiap orang diwadjibkan untuk berbakti kepada kepentingan *umum*, berbakti kepada masjarakat, berbakti kepada Bangsa, berbakti kepada Negara; dan
- b. tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan lajak dalam masjarakat, Bangsa dan Negara itu.

Demikianlah herordening dilapangan politik. Herordening *ekonomis* bermaksud agar supaja seluruh susunan ekonomi-nasional didjadikan pantjatan kearah ekonomi „adil dan makmur” jang akan direalisasi kelak. Djelas disinipun sudah ta' boleh diberi djalan kepada ekonomi liberal, dimana tiap-tiap orang diberi kesempatan untuk menggaruk kekajaan *ten koste* daripada umum. Didalam herordening ekonomis ini, maka kehidupan ekonomis bangsa sudah akan dipimpin, ekonomi bangsa didjadikan ekonomi terpimpin. Sebagai jang saja katakan tadi, maka didalam herordening ini setidak-tidaknja semua alat-alat-vital produksi dan alat-alat-vital distribusi harus dikuasai Negara, atau sedikitnja diawasi oleh Negara. Revolusi Indonesia tidak mengizinkan Indonesia mendjadi padang-penggarukan-harta bagi siapapun, — asing atau bukan asing. Siapa menggaruk kekajaan *ten koste* daripada umum, siapa mengatjau perekonomian umum, dia akan kita tangkap, dia akan kita sérét dimuka hakim, dia akan kita hukum berat, dia kalau perlu akan kita djatuhli hukuman mati !

Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal jang harus kita bantras. Antara lain apa jang dinamakan „hak eigendom” diatas sesuatu bidang tanah. Mulai sekarang kita *tjorét* samasekali „hak eigendom” tanah dari

hukum pertanahan Indonesia. Ta' dapat kita benarkan, di Indonesia Merdeka ada sesuatu bidang tanah jang dieigendomi oleh orang asing, in casu orang Belanda ! Kita hanja kenal hak-milik tanah bagi orang Indonesia; sesuai dengan fasal 33 Undang-Undang-Dasar '45.

Ketjuali herordening politik dan herordening ekonomis, kitapun harus mengadakan herordening sosial. Sedjak petjahnja Revolusi kita, saja sudah menandakan pentingnja „kesedaran sosial”. Lima kesedaran saja tandaskan pada waktu itu. Kesedaran nasional, kesedaran bernegara, kesedaran berpemerintah, kesedaran berangkatan Perang, kesedaran *sosial*, — demikianlah kusebutkan soko-guru-soko-guru bagi kehidupan bangsa, pada waktu itu. Ternjata kesedaran sosial ini dalam waktu survival dan investment bukan makin subur dan makin kokoh, tetapi makin mundur. Badji liberalisme dan individualisme telah menggerogotinja dalam-dalam. Apakah pengedja-wantahan kesedaran sosial daripada bangsa Indonesia? Pengedja-wantahan kesedaran sosial itu ialah persatuan, gotong-rojong, semangat jang saja namakan semangat „ho lopis kuntul baris”. Semangat persatuan, semangat gotong-rojong, semangat „ho lopis kuntul baris” itu adalah sjarat mutlak bagi terse-lenggaranja masjarakat adil dan makmur. Tetapi apa jang kita lihat sedjak kita meninggalkan alam Revolusi phisik, masuk kedalam wilajah Undang-Undang-Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1950? Liberalisme meratjuni kesedaran sosial kita itu, individualismenja meretakkan dan merekahkan semua Kohesinja persatuan kita, kegotong-rojongan kita, keholopiskuntul-barisan kita, sehingga kita mendjadi satu bangsa jang penuh dengan kankernja daerahisme, kankernja sukuisme, kankernja multipartyisme, kankernja golonganisme, dan lain-lain. Individualisme, — itu musuh terbesar daripada idee keadilan sosial —, menjelinaplah kedalam kalbunja bangsa Indonesia, bangsa Indonesia jang dari dulu terkenal sebagai satu bangsa gotong-rojong, dan jang didalam Revolusi phisik memang benar-benar bersikap sebagai satu bangsa jang kompak bergotong-rojong.

Bagaimana kita bisa membangun satu masjarakat keadilan sosial, kalau individualisme meradja-lela didalam kalbu kita? Oleh karena

itu, perlu sekali kita sekarang mengadakan satu herordening sosial, agar supaya dapat terlaksanalah apa jang dimaksud dalam Undang-Undang-Dasar '45 fasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai *usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan*.

Demikianlah, saudara-saudara, maka njata perlu sekali kita mengadakan herordening-herordening dibidang politik, ekonomis, dan sosial itu.

Memang ordening politik-ekonomis-sosial itu pada hakekatnja adalah *inti* daripada Revolusi kita, *djiwa* daripada Revolusi kita. Ia merupakan tiang pokok jang menjangga Revolusi kita itu. Tanpa tiang-pokok ini, Revolusi kita ta' akan mungkin mentjapai tudjuannya dan lebih daripada itu: Revolusi kita akan ambruk ditengah-djalan. "A Revolution is an outburst of the *collective* will of a people", — Revolusi adalah peledakan daripada kemauan *kolektif* daripada sesuatu bangsa, demikian dikatakan oleh seorang sardjana. Dan bagaimana Revolusi kita akan dapat berdjalan, dan mentjapai maksud, kalau kemauan *kollektif* itu telah pudar oleh liberalisme, individualisme, sukuisme, golonganisme, dan lain-lain sebagainya lagi?

Ordering politik-ekonomis-sosial itu dus sebenarnja adalah kekuasaan-pokok, — *hoogste gezagdrager* — daripada kehidupan nasional kita ini. Tiap orang, tiap warga-negara, tiap golongan, ja segala apa jang kumelip diatas bumi Indonesia ini, harus tunduk (gesubordineerd) kepada autoriteitnja *hoogste gezagdrager* ini. Autoriteit jang tertinggi dalam kehidupan Nasional kita itu, autoritet Tjakrawarti dalam Revolusi kita itu, adalah ordening kollektif jang saja maksudkan itu. Sebab ia *menentukan* (bepalend) apakah kita ini akan dapat hidup terus sebagai satu Bangsa jang hendak menjelenggarakan masjarakat adil dan makmur atau tidak. Ia *menentukan* (bepalend) apakah Revolusi kita ini akan mentjapai tudjuannya, ataukah kandas ditengah djalan.

Djelas bahwa autoritet tertinggi ini bukan orang, bukan Presiden, bukan Pemerintah, bukan dewan, tetapi satu *Konsepsi-hidup* jang mendjiwai Revolusi. Pendek-kata dan gampangnja-kata, segala apa jang mendjadi *tjita-tjita* Revolusi '45 itu, — itulah autoritet jang tertinggi, itulah *hoogste gezagdrager*, itulah Tjakrawarti. Itulah jang

harus dilaksanakan, itulah jang harus kita ta'ati, itulah jang harus kita kawulani. Segala susunan kehidupan nasional kita harus kita tudjukan dan tundukkan kepada realisasinja tjita-tjita Revolusi itu. Dan siapa tidak mau ditudjukan kesitu, siapa tidak mau ditundukkan kesitu, dia adalah penghalang Revolusi.

Itulah jang saja maksudkan dengan „ordening”, „herordening”, „retooling”, dan lain sebagainya itu. Dan inilah baiknja Undang-Undang-Dasar '45: ordening dan retooling itu dimungkinkan dan dapat didjalankan, melalui saluran Undang-Undang-Dasar '45. Oleh karena itu pulalah, maka kita kembali kepada Undang-Undang-Dasar 1945.

Saudara-saudara! Saja tidak menjesal, bahwa saja pada tanggal 5 Djuli jang lalu telah mengadakan „Dekrit Presiden”. Saja malahan bersjukur kepada Tuhan, bahwa saja telah mengadakan Dekrit itu. Tindakan tegas jang berupa Dekrit Presiden itu saja ambil, bukan karena saja mau main diktator-diktatoran, tetapi karena berdasarkan kehendak Rakjat jang terbanjak melimpah-limpah. Dan D.P.R. pun belakangan ternjata dengan suara bulat menerima bekerdja terus dalam rangka Undang-Undang-Dasar 1945. Apa jang tidak dapat diterima oleh Konstituante dengan suara $\frac{2}{3}$, diterima oleh D.P.R. dengan suara bulat mupakat seratus persen. Dan didalam Dekrit itu pun saja kemukakan dengan terang apa jang mendjadi pertimbangan saja untuk mengadakan Dekrit itu: gagalnja Konstituante untuk mentjapai suara $\frac{2}{3}$ kembali kepada Undang-Undang-Dasar '45; ta' mungkinnja Konstituante bersidang lagi; keadaan darurat, atau noodstaatsrecht, atau emergency-situation; force-majeur bagi Presiden/Panglima Tertinggi untuk menjelamatkan Republik Proklamasi; hubungannja Piagam Djakarta dengan Undang-Undang-Dasar 1945, — pertimbangan-pertimbangan itulah memaksa kepada saja untuk mengadakan Dekrit itu.

Sungguh, saja ulangi lagi: saja tidak main diktator, dan saja pun tidak menjesal bahwa saja telah mengadakan Dekrit itu. Geweten saja, budi-nurani saja, malahan merasa puas, bahwa saja, dengan mengadakan Dekrit itu, — artinja: dengan mengembalikan Republik Indonesia kepada Undang-undang Dasar Proklamasi —, telah mengembalikan pula Bangsa Indonesia kepada *rèlnja Revolusi*.

Dengan Undang-undang Dasar 1945 itu kita sekarang dapat bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan Revolusi.

Landasan idiil dan landasan struktural untuk bekerja sesuai dengan dasar dan tujuan Revolusi itu, terdapatlah dalam Undang-Undang-Dasar '45 itu. Landasan idiil, yaitu Pantja Sila, dan landasan struktural, yaitu Pemerintahan yang stabil, — kedua-duanya terdapatlah setjara tegas dalam Undang-Undang-Dasar 1945 itu. Baik mukadimahnja, maupun 37 pasalnja, maupun 4 aturan peralihannja, maupun 2 aturan tambahannja, memberi landasan yang kuat idiil dan struktural, yaitu Pantja Sila dan Pemerintahan yang stabil, *untuk bekerja setingkat demi setingkat merealisasikan dasar dan tujuan Revolusi!*

Tahun ini saja namakan „Tahun penemuan-kembali Revolusi”, — the year of the Rediscovery of the Revolution.

Ja, dengan kembali kita kepada Undang-Undang-Dasar '45, kita telah „menemukan kembali Revolusi”. Kita, alhamdulillah, telah „rediscover our Revolution”. Kita merasa diri kita sekarang ini sebagai dirinja seorang pengumbara, yang setelah sepuluh tahun lamanja keblinger puter-giling mengumbara dimana-mana untuk mentjari rumahnja diluar-negeri, achirnja pulang kembali kerumah-asalnja, — pulang kembali kerumahnja sendiri, laksana kerbau pulang kekandangnja.

Saja tidak tahu apakah saudara pernah membuatja Dante. Dante Alighieri, penulis Italia hampir tudjuh abad yang lalu. Didalam karyanja yang bernama „Divina Commedia”, ia melukiskan perjalanannja dari Neraka, melalui Tempat Pensutjian, kepada Sorga: dari *Inferno*, melalui *Purgatorio*, ke *Paradiso*.

Ia menderita segala matjam penderitaan didalam Neraka (*Inferno*), kemudian melalui dan mengalami segala matjam pen-tjutjian ditempat Pensutjian (*Purgatorio*), dan achirnja sesudah sutji, ia mentjapai Sorga (*Paradiso*).

Saja merasa seperti Dante dalam Divina Commedia itu. Saja merasa, bahwa Revolusi kita inipun menderita siksaan segala matjam sjaitannja Neraka, segala matjam penderitaannja *Inferno*, dan kemudian, dengan kembali kita kepada Undang-Undang-Dasar 1945, kini sedang mengalami pensutjian, agar nanti kita bisa

memasuki Sorga. Kini kita sedang dalam Purgatorio, sedang dalam ditjuti dari segala kekotoran, sedang dalam *louteringsproces* dalam segala hal, agar nanti djika kita sudah tertjuti, sudah „gelouterd”, kita dapat memasuki kebahagiaan Paradisonja masjarakat adil dan makmur.

Sjaitan liberalisme, sjaitan federalisme, sjaitan individualisme, sjaitan sukuisme, sjaitan golonganisme, sjaitan penjelèwèngan-penjelèwèngan, sjaitan kepetualangan, sjaitan dualisme empat matjam, sjaitan korupsi, sjaitan garuk-kekajaan hantam-kromo, sjaitan multiparty system, sjaitan pemberontakan, — segala matjam sjaitan telah menerkam kita didalam Inferno itu, dan sekarang kita mengalami purgatorio disegala lapangan. Herorientasi, herordening, retooling, reshaping, remaking, — itu semuanya adalah purgatorio jang perlu, agar supaja kita bisa melandjutkan perdjalanen kita diatas relnja Revolusi, menudju kepada tudjuan Revolusi.

Biar kaum imperialis diluar negeri gègèr! Mereka menuduh kita, bahwa Undang-Undang-Dasar '45 adalah „bikinan Djepang”. Mereka menuduh pula, bahwa kekuasaan Presiden dalam rangka Undang-Undang-Dasar '45 sekarang ini, dilandaskan kepada kediktatoran militer.

Sekali lagi biar mereka gégér! Undang-Undang-Dasar '45 bukan „bikinan Djepang”, Undang-Undang-Dasar '45 bukan „Japanese-made”. Undang-Undang-Dasar '45 adalah asli tjerminan kepribadian (identity) bangsa Indonesia, jang sedjak zaman purbakala-mula mendasarkan sistim pemerintahannja kepada *musjawarat* dan *mufakat* dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral ditangan seorang „sesepuh”, — seorang tetua —, jang tidak mendiktatori, tetapi „memimpin”, „mengajomi”. Demokrasi Indonesia sedjak zaman purbakala-mula adalah Demokrasi Terpimpin, dan ini adalah karakteristik bagi semua demokrasi-demokrasi asli dibenua Asia.

Ja benar, tanpa tètèng aling-aling kita memberi talak-tiga kepada demokrasi-barat jang free-fight-liberalistis itu, tetapi sebaliknyaapun kita dari dulu-mula menolak mentah-mentah kepada kediktatoran. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinja liberalisme, tanpa autokrasinja diktatur. Siapa misalnja hendak mengatakan, bahwa Sun Yat Sen adalah diktator, ketjuali

barangkali orang-orang imperialis sematjam jang menjerang kita itu? Dalam salah satu pidatonja, Sun Yat Sen pernah berkata: "the greatest obstacle to democracy came from those who advocated unrestricted political democracy, but also from those who did no longer dare to advocate democracy". („Rintangan jang paling besar bagi demokrasi datang dari mereka, jang mengandjurkan demokrasi-politik tanpa batas, tetapi djuga dari mereka jang tidak berani lagi mengandjurkan demokrasi”).

Dan „Japanese-made”? Amboi, tidakkah pernah mereka membatja pidato saja tentang „Lahirnja Pantja Sila” pada tanggal 1 Djuni 1945, tatkala Djepang masih berkuasa disini, dimana saja mempergunakan faham-faham pemimpin-pemimpin jang demokratis, dan tidak mengeluarkan sepatah-kata-bengkok-pun mengenai sistim Djepang?

Kaum imperialis itu memang imperialis! Saudara-saudara ingat perkataan saja tadi itu, bahwa Undang-Undang-Dasar '45 memberi landasan struktural jang kuat, jaitu Pemerintahan jang stabil. Dalam Undang-Undang-Dasar '45 parlemen tidak dapat menjatuhkan Pemerintah; jang dapat menjatuhkannya ialah Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Itulah sebabnja saja berkata bahwa Undang-Undang-Dasar '45 mendjamin Pemerintahan jang stabil. Tetapi apa jang kaum imperialis kata? Djangan saudara-saudara tanja, apa jang oleh kaum imperialis dianggap sebagai satu pemerintahan jang stabil. Pernah mereka memudji satu pemerintahan disalah satu negara di Asia ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan disitu itu adalah pemerintahan jang stabil, karena ia mendjamin kepentingan *modal asing!* ("A stable government is a government which guarantees a normal interest for foreign capital").

Apa jang *kita* namakan Pemerintah jang stabil? Pemerintah jang stabil menurut faham kita ialah Pemerintah jang berwibawa, jang dapat bekerdja tenang-teguh bertahun-tahun, tanpa setiap hari Rebo Wagé atau setiap hari Sabtu Paing didjatuhkan oleh oposisi, Pemerintah jang dapat bekerdja tenang-teguh, tidak untuk mendjamin kepentingan modal asing, tetapi untuk mendjamin *sandang pangan bagi Rakjat!*

Ja, biar kaum imperialis gègèr! Kita berdjalan terus! Biar andjing menggonggong, kafilah kita tetap berlalu!

Kita tetap melandjutkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sebagai „tool” untuk memberi pimpinan dalam tingkatan Revolusi kita sekarang ini, agar supaja Revolusi kita itu nanti dengan lantjar dapat memasuki fasenja sosial-ekonomis, jaitu pembinaan masjarakat jang adil dan makmur. Kita tetap mendjalankan retooling disegala lapangan, sambil membangunkan pula tool-tool baru jang perlu. Kita membentuk Kabinet Kerdja, satu kabinet stijl baru, dengan programnja jang termasukhur, jaitu sandang-pangan, keamanan, melandjutkan perdjoangan anti-imperialis. Program ini amat sederhana, amat tidak muluk-muluk, tetapi amat realistik, dan *amat penting dan amat fundamental untuk kelandjutan Revolusi*. Kalau kita hendak bekerdja untuk realisasi masjarakat adil dan makmur, maka tiga hal jang tertjantung dalam program kabinet itu *harus kita realisasikan lebih dahulu*. Ta' dapat kita sebagai bangsa membina suatu masjarakat baru jang lengkap modern dan adil, kalau Rakjat tidak tertjukupi minimal iapunja sandang dan iapunja pangan. Ta' dapat, ta' mungkin, masjarakat baru sematjam itu tersusun, kalau Rakjat jang harus menjusunnja itu ta' mempunjai kain untuk menutupi tubuhnja, kalau ia ta' dapat bernaung sekadarnja daripada hudjan dan teriknja matahari, kalau perutnja kerontjongon karena tiada beras untuk mengisinja. Ta' dapat pembangunan-semesta untuk masjarakat adil dan makmur berdjalan baik, kalau keamanan selalu terganggu. Ta' dapat kita mengambil manfaat seratus persèn daripada kekajaan bumi dan air kita sendiri, kalau imperialisme ekonomi dan imperialisme politik masih bertjokol ditubuh kita, laksana lintah jang menghisap darah, atau kempladean jang membinasakan pohon. Program kabinet ini amat sederhana, bunjinja amat sederhana, tetapi sungguh, ia amat-amat fundamental sekali!

Baik saja tandaskan disini, bahwa 3 pasal program Kabinet itu memang *belum* dan *bukan* masjarakat jang adil dan makmur. Masjarakat jang adil dan makmur bukan *hanja* berisi tjukup sandang-pangan sadja, apalagi kalau sandang-pangan itu sekadar bersifat minimum. Masjarakat adil dan makmur adalah masjarakat

jang teknis tinggi, lengkap modern sampai kepuntjak-puntjak gunung, lengkap modern materiil dan kulturil, dengan pengetjapan oleh seluruh Rakjat setjara adil.

Program Kabinet tidak menjanggupkan masjarakat jang demikian itu.

En toh, — djangan saudara-saudara mengira bahwa Kabinet Kerdja ini, karena programnja terdiri hanja dari sandang-pangan, keamanan, dan perdjoangan anti-imperialis tok, dus setjara sempit *hanja* mengerdjakan tiga hal itu sadja, dan *tidak* mengerdjakan hal-hal lain jang bersangkutan dengan tjita-tjita Revolusi. Ambillah misalnja sandang-pangan. Apakah dus Kabinet Kerdja *hanja* bekerdja mengichtiarkan supaja Rakjat dimana-mana bisa membeli beras-garam-gula-kopi-minjak-ikanasin sadja, plus sekian meter kain buat setiap orang setiap tahun, — dan *tidak* memfikirkan hal-hal ekonomi jang lain? Kita *tidak* sesempit itu! Program adalah *penondjolan ichtiar jang paling mendesak, penondjolan ichtiar jang paling urgent*. Disamping program itu, adalah banjak lagi hal-hal jang harus dikerdjakan memang persoalan-persoalan kita sebagai bangsa jang berrevolusi adalah persoalan-persoalan jang djalin-mendjalin, persoalan-persoalan jang amat kompleks, persoalan-persoalan jang ta' dapat dipisahkan satu daripada jang lain. Kita hanja dapat *menondjalkan* sesuatu persoalan daripada persoalan-persoalan jang lain, sebagai satu persoalan jang paling urgent, tetapi kita tidak dapat *melepaskannja* dari persoalan-persoalan jang lain.

Misalnja persoalan ekonomi kita *bukan hanja* persoalan „sandang-pangan” sadja. Persoalan ekonomi kita adalah persoalan jang lebih luas daripada itu. Kini benar-benar sudah tibalah waktunja untuk mulai *mempraktèkkan* beberapa sembojan ekonomi. Misalnja sembojan „merombak ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional”, sekarang harus dinaikkan kepada tingkat jang lebih tinggi. Sembojan „merombak ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional” harus kita naikkan tingkat dari sembojan jang *diserukan*, mendjadi sembojan jang mulai *dipraktèkkan!* Pengambilan-alih perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka perdjoangan pembebasan Irian Barat adalah satu langkah jang amat penting sekali. Tetapi belum semua modal Belanda diambil-alih, belum semua perusahaan

Belanda dinasionalisir. Padahal sikap Belanda dalam hal Irian Barat tetap membandel! Saja lantungkan sinjalemen disini, bahwa djika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, djika mereka dalam persoalan claim nasional kita tetap berkepala batu, maka semua modal Belanda, termasuk jang berada dalam perusahaan-perusahaan-tjampuran, akan habis-tammat riwayatnja sama-sekali dibumi Indonesia!

Dan bergandengan dengan ini, kepada alap-alap kapitalis bangsa sendiri pun saja lantungkan penegasan bahwa sesuai dengan fasal 33 Undang-Undang-Dasar '45 ayat 2 dan ayat 3, tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat-hidup orang banjak, akan dikuasai oleh *Negara, dan tidak akan dipartikelirkan!*

Dan terhadap kepada modal asing bukan Belanda saja tegaskan disini bahwa mereka harus mentaati ketentuan-ketentuan Republik. Djangan mereka mendjalankan peranan jang negatif. Djangan mereka mentjoba-tjoba memperdajakan Republik. Djangan mereka membantu gelap-gelapan kepada kontrarevolusi, djangan mereka mendjalankan sabotase-sabotase ekonomi. Meski kita berdiri diatas prinsip, bahwa untuk pembangunan kita memberikan prioritas kepada modal sendiri, dan bahwa djika toh diperlukan modal dari luar, kita mengutamakan kredit daripada penanaman modal asing, — dan prinsip ini saja tandaskan lagi disini —, meski demikian, kita toh tjukup toleran terhadap kepada modal-asing-bukan-Belanda jang sudah berada disini dan jang mungkin akan ada disini. Tetapi sjarat-mutlak bagi bolehnja modal-asing itu bekerdja disini ialah bahwa mereka mentaati semua ketentuan-ketentuan Republik. Djika mereka tidak mentaati ketentuan-ketentuan itu, djika mereka mendjalankan peranan jang negatif, djika mereka misalnja diam-diam mendjalankan sabotase ekonomi atau setjara gelap-gelapan memberi bantuan kepada kontra-revolusi, maka djanganlah kaget, djika nanti Rakjat Indonesia memperlakukan mereka sama dengan modal jang asalnja dari negeri Belanda itu.

Saudara-saudara melihat, bahwa dus tidak benar, kalau dikira bahwa kita *hanja* mengichtiarkan „sandang pangan” sadja. Demikian pula tidak benar, kalau orang mengira, bahwa, karena fasal 3 program kabinet berbunji „melandjutkan perdjoangan menentang-

imperialisme ekonomi dan imperialisme politik”, maka kita tidak akan mengambil pusing hal imperialisme-imperialisme lain, misalnya imperialisme *kebudajaan*. Saja telah memberi instruksi kepada menteri-muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan dibidang kebudayaan ini, untuk melindungi kebudayaan nasional dan mendjamin berkembangnja kebudayaan nasional.

Dan engkau, hai pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, engkau jang tentunja anti imperialisme ekonomi dan menentang imperialisme ekonomi, engkau jang menentang imperialisme politik, — kenapa dikalangan engkau banjak jang tidak menentang imperialisme kebudayaan? Kenapa dikalangan engkau banjak jang masih rock-'n-roll-rock-'n-rollan, dansi-dansian à la cha-cha-cha, musik-musikan à la ngakngik-ngék gila-gilaan, dan lain-lain sebagainya lagi? Kenapa dikalangan engkau banjak jang gemar membatja tulisan-tulisan dari luaran, jang njata itu adalah imperialisme kebudayaan? Pemerintah akan melindungi kebudayaan Nasional, dan akan membantu berkembangnja kebudayaan Nasional, tetapi engkau pemuda-pemudi pun harus aktif ikut menentang imperialisme kebudayaan, dan melindungi serta memperkembangkan kebudayaan Nasional !

Chusus mengenai perdjoangan Irian Barat, saja menjatakan disini bahwa benar Pemerintah tidak akan memasukkan soal Irian Barat itu ke P.B.B. tahun ini. Tetapi itu tidak berarti, bahwa Pemerintah kendor dalam perdjoangannya mengenai Irian Barat. Tidak ! Samasekali tidak ! Sebaliknya ! Pemerintah memperhebat perdjoangan Irian Barat itu dilapangan *lain* daripada P.B.B. Pemerintah memperhebat perdjoangannya itu dilapangan *ekonomi*. Pemerintah mengakui bahwa perdjoangan Irian Barat harus dilakukan disegala lapangan, ja didalam negeri ja diluar negeri, tetapi buat tahun ini Pemerintah mengkonsentrir perdjoangannya melawan Belanda itu dilapangan *ekonomi*. Ingatlah kepada pemindahan pasar ke Bremen, ingatlah kepada keputusan kita untuk tidak mengakui ada hak eigendom Belanda lagi diatas sesuatu bidang tanah Indonesia, ingatlah kepada utjapan saja tadi, bahwa djika Belanda tetap membandel dalam persoalan Irian Barat, maka akan habis-tamat-

lah samasekali riwayat semua modal Belanda di Indonesia. Tjoba lihat nanti, fihak Belanda dan kontjo-kontjonja imperialis tentu akan gégér-marah oleh keputusan-keputusan kita ini, dan kegégéran mereka itu pun harus dan akan kita lajani didunia internasional. Pemerintah berpendapat lebih baik mengkonsentrir enersinja diluar-negeri pada pelajaran kegégéran inilah, dan tidak memetjah-metjah enersinja itu antara pelajaran kegégéran ini + perdjongan di P.B.B. Dan bagi P.B.B. sendiri pun, sikap kita sekarang ini (untuk tidak memasukkan Irian Barat dalam atjara P.B.B.), harus diberi arti jang langsung mengenai P.B.B. Saja harap P.B.B. dengan sikap kita sekarang ini mengarti, bagaimana perasaan kita terhadap kepada P.B.B. ! Mengenai Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dengan terus-terang saja katakan disini, bahwa saja kurang puas dengan aksinja F.N.P.I.B. itu. Djanganlah F.N.P.I.B. itu makin lama makin mendjadi badan jang djustru paling sedikit minatnja mengenai Irian Barat ! Djanganlah ia mengurus hal-hal lain jang tidak langsung mengenai perdjongan Irian Barat, misalnja perusahaan perkapalan dan pelajaran, dan totalisator ! F.N.P.I.B. harus mengkonsentrir dirinja pada *menggelorakan massa untuk perdjongan Irian Barat !*

Mengenai fasal 2 daripada Program, jaitu Keamanan, saja bisa memberitahukan kepada saudara-saudara sebagai berikut:

Dalam melaksanakan program keamanan Negara dan keamanan Rakjat harus diinsjafi, bahwa masih luas dan berat tugas kita. Keamanan Negara masih njata menghadapi gerombolan-gerombolan pemberontakan D.I., P.R.R.I./Permesta dan sisa-sisa R.M.S. dan K.R.J.T. dari dalam, dengan aksi-aksi subversif asing dari dalam dan dari luar.

Beleid keamanan Pemerintah tetap tegas. Pemerintah meneruskan dan memperhebat operasi-operasi keamanan dengan pengerahan kekuatan alat-alat negara dan rakjat setjara maximal. *Pemerintah tidak mau mengadakan perundingan atau kompromis dengan pemberontak.* Disamping itu, setiap usaha dan djalan lain jang membantu operasi-operasi tersebut, untuk mempertjepat hasil-hasil, dan mengurangi korban-korban, sudah tentu dipergunakan. Pemberontak jang insjaf-kembali dan menjerah tanpa sjarat, dan ichlas

ingin kembali kepangkuan Republik Indonesia '45, mendapat perlakuan jang wadjar.

Sebagai hasil-hasil penghebatan operasi-operasi belakangan ini, dan karena semangat kembali ke Undang-Undang-Dasar '45, maka djumlah mereka jang menghentikan perlawanan di Atjeh dan Sulawesi terus bertambah.

Intensivering operasi-operasi keamanan dilaksanakan dalam batas-batas kemampuan kita jang maximal. Penambahan personil, materiil dan kesatuan-kesatuan daripada ke 3 Angkatan dan Kepolisian berdjalan terus, walaupun dalam suasana finek Negara jang sulit. Kesulitan finek tersebut menjulitkan dengan sendirinja logistik A.P.R.I., serta menjulitkan penambahan kekuatan. Namun semangat '45 dan moril pradjurit-pradjurit jang tetap tinggi merupakan modal jang utama, jang dengan ini perlu kita njatakan penghargaan setinggi-tingginja. A.P.R.I. tidak mengenal istirahat tugas operasi sedjak '45. Namun semangat-berdjoang dan semangat-berkorbannja tetap tinggi, walaupun keadaan peralatan dan perlengkapan A.P.R.I. dalam operasi-operasi menghadapi P.R.R.I./Permesta adalah djauh dibawah norma-norma minimal jang lazim. Namun dengan semangat perdjoangan '45, pradjurit-pradjurit kita telah dapat mentjiptakan hasil-hasil jang membanggakan Negara dan Bangsa!

Usaha-usaha perwakilan-perwakilan kita di Luar Negeri telah lumajan pula berhasil dalam menggunakan hasil-hasil operasi-operasi di Dalam Negeri, untuk mengurangi-djauh kesempatan dan ruang-bergerak pemberontak di Luar Negeri.

Harus diakui, bahwa dimasa jang lalu masih kuranglah koordinasi antara alat-alat Negara dan Kementerian-Kementerian, baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, untuk memungkinkan kesempurnaan usaha-usaha keamanan. Dengan struktur Undang-Undang-Dasar '45, dan adanja Menteri-inti Keamanan/Pertahanan, dirantjangkanlah untuk menjempurnakan koordinasi tersebut. Usaha-usaha jang disebut "follow-up", akan lebih dikoordinir dan lebih diintensivir.

Dalam rangka mengikut-sertakan Rakjat, Pemerintah akan mengintensivir organisasi-organisasi keamanan Rakjat dan wadjib-

latih bagi pemuda-pemuda dan veteran taraf demi taraf, berdasarkan kemampuan personil dan materiil untuk pelaksanaannya. Begitu pula tahun ini dimulai dengan milisi darurat diseluruh Indonesia.

Tapi dengan hasil-hasil sekarang, serta program yang ada untuk intensivering, kita harus menghadapi persoalan keamanan ini dalam proporsinya yang sebenarnya. Program Pemerintah adalah untuk melaksanakan keamanan negara terhadap gerombolan-gerombolan pemberontak dalam 2 à 3 tahun. Tetapi mengingat sifat gerilja dan anti-gerilja yang berkembang sedjak perang dunia yang lalu, maka konsolidasi dan stabilisasi territorial sepenuhnya bagi keamanan rakyat yang merata, mungkin masih memerlukan waktu yang lebih lama. Pula oleh karena usaha ini tidak akan lepas daripada perkembangan politik, sosial dan ekonomi dalam keseluruhannya.

Dalam keadaan serba sulit menghadapi pemberontakan P.R.R.I./Permesta ini, kita toh telah berhasil pula memodernisir A.P.R.I. dengan lumajan. Bagi A.L.R.I. kita telah mentjapai kekuatan sampai 10 ×, dan bagi A.U.R.I. sampai 6 à 7 × daripada dahulu. Dan A.D. kita mulai dengan lumajan pula memperbaharui alat-alat tuannya warisan Belanda dahulu.

Pembangunan Kepolisian Negara dilandjutkan pula. Dan koordinasi dengan militer disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah mengenai militerisasi Kepolisian Negara, khususnya Mobrig.

Dalam pelaksanaan keamanan Negara dan Rakyat, kita ta' boleh lupa, bahwa penertiban dan penjehatan alat-alat kekuasaan Negara itu *sendiri* adalah sjarat mutlak. Kita harus lebih giat dan lebih efektif lagi berusaha untuk menertibkan dan meng-effisiensikan apparatus-apparatur Negara, personil militer dan sipil, baik teknis maupun ideologis, untuk mempertinggi disiplin dan produktiviteit kerdjanya. „Operasi Sedar” dan „Operasi Effisiensi Kerdja” harus kita lantjarkan dalam tubuh alat-alat Negara sendiri, tanpa ragu-ragu. Operasi-operasi ini adalah sjarat utama untuk tugas keamanan Negara dan Rakyat. Operasi-operasi ini adalah retooling pula.

Ke 3 fasal program Kabinet Kerdja adalah tidak dapat dipisahkan. Dan dalam rangka itu tenaga-tenaga A.P.R.I. djuga sebanjak mungkin disumbangkan dibidang produksi, distribusi, pembangunan dan kesedjahteraan Rakyat.

A.P.R.I. bukan tentara jang berdiri terpisah daripada Rakjat. A.P.R.I. adalah sebagian daripada Rakjat. A.P.R.I. tumbuh dari Revolusi sebagai bagian daripada Rakjat jang ber-Revolusi. Persatuan Rakjat dan tentara adalah satu unsur utama daripada hakiki Negara dan Angkatan Perang kita.

Maka, disamping keperluan khusus keamanan, terutama di daerah-daerah operasi, wewenang Undang-Undang Keadaan Bahaja harus dimanfaatkan pula setjara bidjaksana untuk menerobos kematjetan atau keseratan berbagai usaha Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah dalam keseluruhannya.

Saudara-Saudara! Dengan programnja jang tampaknja sadja amat sederhana, tetapi dengan realitet bahwa ia sebenarnja menghadapi pekerdjaan-raksasa dan perdjoangan-raksasa jang multi-kompleks sebagai saja uraikan tadi, maka Kabinet Kerdja merasa dirinja ta' mampu akan mentjapai hasil apa-apa, *tanpa bantuan daripada Rakjat*. Oleh karena itu, maka Kabinet Kerdja merasa dirinja beruntung, bahwa Undang-Undang-Dasar '45 menentukan, bahwa Republik Indonesia harus mempunyai Dewan Pertimbangan Agung, jang „berkewadajiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden, dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah”. Oleh karena itu pula, maka Presiden telah membentuk satu Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan malahan telah melantiknja pula pada hari kemarin dulu. Presiden telah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara ini atas prinsip perlu-mutlaknya bantuan Rakjat buat segala urusan ke Negara dan ke Masjarakatan, dan atas sifat-hakekat kepribadian Bangsa Indonesia jang berinti *gotong-rojong*. Bantuan Rakjat dan gotong-rojong ini sedjauh-mungkin ditjorkan oleh Presiden dalam susunan keanggautaan Dewan Pertimbangan Agung Sementara itu: segala aliran-faham, segala golongan, segala tjorak-fikir jang progressif, dalam rangka Undang-Undang-Dasar '45, dimasukkan dalam Dewan Pertimbangan Agung Sementara itu. Demikian pula dalam Dewan Perantjang Nasional jang djuga sudah dilantik kemarin dulu, demikian pula Insja Allah dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nanti, demikian pula Insja Allah dalam Front Nasional jang perlu pula dibangunkan.

Ini adalah untuk mendjamin bantuan Rakjat sepenuhnya, dan ini adalah sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, kataku tadi. Empat belas tahun jang lalu lebih, dizaman Djepang, jaitu sebelum Proklamasi, dalam pidato „Lahirnja Pantja Sila” sudah saja tandaskan, bahwa kepribadian Bangsa Indonesia ialah gotong-rojong. Pantja Sila adalah pendjelmaan kepribadian Bangsa Indonesia itu, dan djika Pantja Sila itu „diperas”, mendjadilah ia Tri Sila Ketuhanan-Sosionasionalisme-Sosiodemokrasi, dan djika Tri Sila ini „diperas” lagi, mendjadilah ia Eka Sila, jaitu *Gotong-Rojong*. Gotong-Rojong jang tidak statis seperti „kekeluargaan” sadja, tetapi Gotong-Rojong jang dinamis, Gotong-Rojong jang berkarya hatjantjut-taliwanda, Gotong-Rojong „Ho-lopis-Kuntul-Baris”.

Ja, Idee ke-Gotong-Rojongan ini dipegang-teguh dalam pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan Dewan Perantjang Nasional, dan akan dipegang teguh pula dalam pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara nanti. Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai saudara-saudara ketahuhi adalah amat-amat penting sekali, oleh karena ia menurut Undang-Undang-Dasar '45 „menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara”. Ia adalah menurut fasal I ayat 2 Undang-Undang-Dasar '45 pendjelmaan Kedaulatan Rakjat pengedja-wantahan daripada Kedaulatan Rakjat, oleh karena fasal I ayat 2 itu berbunji:

„Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan *sepenuhnja* oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat”.

Ia terdiri dari anggauta-anggauta D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan. Buat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, maka anggauta-anggauta D.P.R.-nja adalah D.P.R. jang sekarang, dan anggauta-anggauta-daerah dan anggauta-anggautagolongannja harus diangkat oleh Presiden. Maka djelas dan teranglah bahwa Presiden dalam pengangkatannja itu harus merealisasikan pengumpulan seluruh tenaga-tenaga-daerah dan seluruh tenaga-tenaga-golongan jang representatif. Ini adalah sesuai dengan prinsip ke-Gotong-Rojongan, dan saja Insja Allah akan pegang teguh prinsip ke-Gotong-Rojongan itu. Sudah barang tentu ke-Gotong-Rojongan dalam melandjutkan dan menjelesaikan Revolusi! Orang-orang jang

reaksioner, orang-orang kontra revolusioner, tidak akan saja angkat djadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara itu !

Idee *Front Nasional* sebenarnya djugalah keluar daripada prinsip Gotong-Rojong „Ho-lopis-kuntul-baris” itu. *Seluruh* tenaga Rakjat harus digalang dan didjadikan *satu gelombang-tenaga jang maha-sjakti*, menudju kepada terbangunnja satu masjarakat jang adil dan makmur, — menudju kepada penjelesaian Revolusi. Dan penggalangan itulah tugasnja *Front Nasional*. Mendjadi, *Front Nasional* itu adalah satu hal jang prinsipil-fundamental: sebab pembangunan semesta ta' mungkin berhasil tanpa mobilisasi tenaga semesta pula, Revolusi ta' mungkin berdjalan penuh kearah tudjuannja tanpa ikut-ber-Revolusinja seluruh Rakjat. *Front Nasional* nanti diadakan untuk menggalang seluruh tenaga daripada seluruh Rakjat. Ia harus menggalang seluruh ke-Gotong-Rojongan Rakjat. *Front Nasional* itulah dus jang harus menggalang semangat dan tenaga latent dikalangan Rakjat, didjadikan satu gelombang „ke-ho-lopis-kuntul-barisan” untuk menjelesaikan Revolusi.

Oleh karena itulah maka terkandung dalam niat Pemerintah untuk membangunkan *Front Nasional* itu secepat mungkin, sebagaimana dalam pidato saja dihadapan Konstituante 22 April jang lalu saja telah katakan, bahwa „Pembentukan *Front Nasional* baru terutama dimaksudkan untuk mengadakan alat *penggerak masjarakat* setjara demokratis, jang diperlukan pertama-tama dibidang pembangunan”.

Saudara-saudara ! Kemarin dulu saja pun telah melantik Bapekan: „Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara”. Tugasnja djelas: „mengawasi Kegiatan Aparatur Negara”. Sebagai saja katakan tadi, kita mendjalankan dan akan mendjalankan retooling disegala bidang, dan sudah barang tentu terutama sekali retooling disegala aparatur Negara, baik vertikal maupun horizontal. Dan aparatur Negara jang retooled ini harus diawasi dalam pekerdjannja, harus dikontrol, diteliti, diamat-amati, agar supaja terdjamin efisiensi kerdja jang maximal. Tidak boleh lagi sesuatu aparatur Negara ta' lantjar karena memang salah organisasinja, dan tidak boleh lagi orang bekerdja pada aparatur Negara dengan setjara lénggang-kangkung, malas-malasan, ngantuk, atau mementingkan

kepentingan sendiri dengan djalan korupsi-waktu atau korupsi-uang. Dalam Revolusi tidak ada tempat bagi orang-orang jang demikian itu !

Telah saja lantik pula Dewan Perantjang Nasional, dengan anggautanja jang berasal dari seluruh tanah-air Indonesia antara Sabang dan Merauke, untuk merantjangkan pola masjarakat jang adil dan makmur. Garis-garis besar daripada pembuatan pola itu Insja Allah akan saja utjapkan dalam amanat pada pembukaan sidangnja jang pertama. Pokok daripada segala pokok daripada tugas Dewan Perantjang Nasional ialah, bahwa ia harus membuat blueprint daripada suatu masjarakat Indonesia jang berkeadilan sosial, suatu masjarakat Indonesia sebagai jang dimaksudkan oleh mukadimah Undang-Undang-Dasar, dan fasal 33 Undang-Undang-Dasar, — suatu masjarakat Indonesia jang betul-betul adil *dan* makmur, betul-betul makmur *dan* adil pula. Tidak Dewan Perantjang Nasional disuruh membuat pola masjarakat Indonesia jang makmur tetapi tidak adil; tidak Dewan Perantjang Nasional harus membuat blueprint jang adil tetapi tidak makmur. „Tata-tentrem-kerta-rahardja, gemah-ripah loh-djinawi, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku”, itulah harus djelas tampak nanti dalam pola Dewan Perantjang Nasional itu !

Dan djikalau nanti pola Dewan Perantjang Nasional itu sudah diterima oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka djadilah ia *Pola Nasional*, jang harus kita laksanakan dengan meng- „ho-lopis-kuntul-baris” kan seluruh tenaga Rakjat, seluruh sarana-sarana Bangsa jang telah retooled, seluruh semangat dan daja-kerdja jang berada diantara Sabang dan Merauke. „Lir gabah dèn interi” kita semua harus melaksanakan pola Dewan Perantjang Nasional itu. Mendakilah kita sesudah mengalami Purgatorio kini, kepuntjaknja Gunung Paradiso jang telah sekian lamanja melambai-lambai.

Saudara-saudara! Saja telah mendekati achirnja pidato saja ini. Sekarang dengarkanlah dengan saksama apa jang saja katakan ini:

Kita sekarang sudah kembali lagi kepangkuan Undang-Undang-Dasar 1945. Perlu saja tegaskan disini, bahwa Undang-Undang-Dasar 1945 dalam Revolusi kita ini tidak pernah gugur tidak pernah tiwas, sehingga berlakunja-kembali Undang-Undang-Dasar 1945 itu hanja

lah satu pernyataan resmi sadja jang bernama „Dekrit Presiden”. Undang-Undang-Dasar 1945 tidak pernah mati, melainkan hanja terpaksa berbaring diam diatas ombang-ambingnja gelombang Renville, gelombang Linggardjati, gelombang K.M.B., gelombang konstitusi Republik Indonesia Serikat dan konstitusi 1950, gelombang Uni Indonesia-Belanda, — jang semuanja telah hilang amblas berkat semangat kepatriotan Bangsa Indonesia dan tenaga perdjoangan Rakjat Indonesia. Demikian pula maka demokrasi-liberal jang dilahirkan sebagai buih daripada gelombang-gelombang kompromis jang djahat itu, dan jang membendung dan mengatjau Revolusi Indonesia itu, kini telah ditiup-lenjap oleh semangat kepatriotan dan tenaga-perdjoangan Rakjat Indonesia itu, dan mulailah kini dikibarkan bendera Demokrasi Terpimpin, milik-asli daripada Bangsa Indonesia.

Saja mengutjap sjukur kepada Tuhanku, Tuhan seru sekalian alam, bahwa djalannja Revolusi Indonesia demikianlah. Meski teresat sedjurus waktu, achirnja toh telah kembali lagi kepada relnja jang asali. Telah beberapa kali dalam hidup saja ini saja mengguriskan rintisan sebagai sumbangan kepada perdjoangan Rakjat Indonesia, — dizaman kolonial sebelum Perang Dunia jang II, di Pegangsaan Timur, di Bangka, di Djokja, di Djakarta. Kini datanglah saatnja saja memberi *kerangka* jang tegas kepada semua rintisan-rintisan jang telah saja guriskan itu. Adalah *tiga* seginja kerangka bagi rintisan-rintisan itu, jang selalu sadja kembali dalam renungan saja, tiap kali saja memandang wadjah Rakjat-djelata Indonesia, tiap kali saja melihat ketjantikan alam tanah-airku, tiap kali saja mengadakan perdjalananan mengedari bumi, tiap kali saja menengadahkan muka diwaktu malam dan melihat bintang-bintang abadi berkumelip diangkasa-raja.

Apakah tiga segi kerangka itu?

Kesatu: Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, jang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.

Kedua: Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.

Ketiga: Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar berkerdja-bersama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna.

Sebutkanlah saja ini seorang pengalamun atau seorang pemimpi, seorang idealis atau seorang „Schwärmer“. Tetapi tiga segi kerangka tadi itu sekarang telah mendjadi tantangan yang nyata bagi kita semua, telah mendjadi challenge yang riil, yang ta' dapat kita hindari lagi. Challenge, kalau benar kita ingin bahagia; challenge, kalau benar kita tidak ingin hantjur-binasa dimuka bumi ini. Challenge pula, oleh karena kita, mau-tidak-mau, dibawa-ditarik-dihela oleh pergolakan-pergolakan yang sekarang sedang bergelora diseluruh muka bumi, dekat dari sini dan djauh dari sini.

Ada dua matjam revolusi hebat sekarang sedang bergolak dimuka bumi ini: *Pertama* revolusi politis-sosial-ekonomis yang menghikmati tiga-perempat dari seluruh ummat manusia, *kedua* revolusi teknik-peperangan berhubungan dengan persendjataan thermo-nuclear.

Kedua-dua revolusi ini mendjadi tantangan dan tanggungan seluruh ummat manusia, termasuk ummat Indonesia, — mendjadi challenge yang seram, satu todongan yang menanjakan hidup atau mati. Kita ta' dapat meloloskan diri kita dari todongan ini, dan ummat-manusiapun ta' dapat meloloskan dirinja dari todongan atau challenge ini. Mau-tidak-mau kita harus ikut-serta, mau-tidak-mau kita harus ikut bertempur! Dan djika ummat manusia ta' bisa menjelesaikan todongannya challenge ini, maka ini berarti hantjur-binasanja ummat manusia sendiri.

Ja, mau-ta'-mau kita harus ikut-serta! Dan ikut-serta massal! Dalam abad ke XX ini, dengan iapunja teknik-perhubungan yang tinggi, tiap revolusi adalah revolusi *Rakjat*, revolusi *Massa*, bukan sebagai diabad-abad yang lalu, yang revolusi-revolusinja adalah

sering sekali revolusinja segundukan manusia-atasan sadja, — "the revolution of the ruling few". Dalam Risalah „mentjapai Indonesia Merdeka" hampir tigapuluh tahun jang lalu saja sudah berkata: „Tidak ada satu perobahan besar didalam riwayat-dunia jang achir-achir ini, jang lahirnja tidak karena massa-actie. Massa-actie adalah senantiasa mendjadi penghantar pada saat masjarakat-tua melangkah kedalam masjarakat jang baru. Massa-actie adalah senantiasa mendjadi paradji (bidan) pada saat masjarakat-tua jang hamil itu melahirkan masjarakat jang baru".

Dan revolusi dalam abad ke XX itu menjangkut dengan sekaligus setjara berbareng hampir segala bidang daripada penghidupan dan kehidupan manusia. Ia menjangkut bidang politik, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang ekonomi, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang sosial, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang kebudajaan, dan berbarengan dengan itu djuga menjangkut bidang kemiliteran, dan demikian seterusnya. Tidak seperti diabad-abad jang lampau, dimana revolusi-revolusi adalah seringkali revolusi politik tok, atau revolusi ekonomi tok, atau revolusi sosial tok, atau revolusi militer tok, dan kerenanja djuga dapat dilaksanakan setjara bidang-bidang itu tok.

Tetapi revolusi zaman sekarang ? Revolusi zaman sekarang adalah revolusi jang *multi-kompleks*. Ia adalah revolusi jang simultan. Ia adalah revolusi jang sekaligus „memborong" beberapa persoalan. Misalnja Revolusi kita. Revolusi kita ini ja revolusi politik, ja revolusi ekonomi, ja revolusi sosial, ja revolusi kebudajaan, ja revolusi segala matjam. Sampai-sampai ia djuga revolusi isi-manusia! Pernah saja memindjam perkataan seorang sardjana asing, jang mengatakan bahwa Revolusi Indonesia sekarang ini adalah "a summing-up of many revolutions in one generation", — atau "the revolution of many generation in one".

Revolusi jang demikian ini ta' dapat diselesaikan dengan tjara-tjara jang konvensional. Ta' dapat ia diselesaikan dengan tjara-tjara jang keluar dari gudang-apeknja liberalisme. Ta' dapat ia diselesaikan dengan tjara-tjara jang tertulis dalam text-booknja kaum sardjana dari zaman baheula. Malah tjara-tjara jang demikian itu ternjata makin mengkotjar-katjirkan dan membentjanai revolusi.

Bukan sadja di Indonesia orang berpengalaman begitu, tetapi djuga pemimpin-pemimpin dinegara-negara lain mulai sadar akan hal itu. Demokrasi Barat di beberapa negara Asia sekarang sudah dinjatakan mengalami kegagalan. Indonesia hendak menjelesaikan Revolusinja jang multikompleks itu dengan sistimnja Demokrasi Terpimpin, demokrasi Indonesia sendiri. Segala penjelwéngan, segala langkah-salah, segala salah-wissel dari masa sesudah 1950, kita koreksi dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi 5 Djuli 1959, jang memungkinkan djuga Demokrasi Terpimpin berdjalan.

Terutama kepada pemimpin-pemimpin Bangsa kita saja tandaskan disini, bahwa Revolusi kita ini tidak hanja meminta sumbangan-keringat sadja jang sebesar-besarnja, atau disiplin jang sekokoh-kokohnja, atau pengorbanan jang seichlas-ichlasnja, — jang oleh kita pemimpin-pemimpin selalu kita gembar-gemborkan kepada Rakjat ! —, tetapi djuga tidak kurang penting ialah kebutuhan untuk mentjiptakan atau melahirkan *fikiran-fikiran-baru* dan *konsepsi-konsepsi-baru*, djustru oleh karena Revolusi kita sekarang ini ta 'dapat diselesaikan dengan mempergunakan textbook-textbook jang telah usang.

Revolusi kita adalah antara lain menentang imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja. Imperialisme apapun dan imperialisme manapun, kita kritik, kita tentang, kita gasak, kita hantam. Meskipun demikian, Revolusi kita tidak *ditudjukan* untuk memusuhi sesuatu bangsa jang manapun djuga. Kita mengulurkan tangan-persahabatan kepada semua bangsa didunia ini, untuk memperkokoh kesedjahteraan-dunia, dan memperkokoh perdamaian-dunia.

Teristimewa kepada 2.500.000.000 ummat-manusia jang ber-revolusi sekarang ini, tigaperempat lebih dari seluruh penduduk bumi, kita serukan adjakan untuk saling membantu, saling memberi inspirasi, saling kasih-mengasih dalam menggali konsepsi-konsepsi-baru jang dibutuhkan oleh Revolusi-semesta sebagai jang saja terangkan dimuka tadi !

Malah untuk menanggulangi revolusi teknik-peperangan jang sekarang ini sedang menghantu dipadang persendjataan dan menghintai-hintai laksana sjaitan-kebinasaan ditjakrawala, bantu-membantu antara 2500.000.000 ummat manusia itu adalah perlu sekali, bahkan

— dasar-dasar daripada ko-eksistensi jang aktif dan kerdja-sama jang erat antara *seluruh ummat-manusia jang 3.000.000.000* harus ditanam, terlepas daripada perbedaan-perbedaan didalam lapangan sistim-sosial dan sistim-politik. Atas dasar ini maka segala pertjo-baan, segala pembikinan, segala pemakaian sendjata thermonuclear harus distop selekas-lekasnja, dan dilarang sekeras-kerasnja.

Ja, kapankah ummat-manusia ini dapat hidup tenteram-sedjahtera bersahabat satu sama lain sebagai sama-sama anaknja Adam? Kapankah ummat Indonesia dapat hidup dalam tripokoknja kerangka, jang saban-saban terbajang diangan-angan saja, tiap-tiap kali saja memandang kepada bintang dilangit, — Negara Kesatuan, masjarakat adil dan makmur, persahabatan dengan seluruh bangsa?

Alangkah banjarknja kesulitan jang masih kita hadapi! Tetapi pengalaman jang sudah-sudah membuktikan, bahwa kita selalu "survive", bahwa dus kita selalu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan jang maha besar! Ja, asal kita tetap bersatu, asal kita tetap berdjiwa segar, asal kita tetap mendjaga djangan sampai perdjoangan kita ini dihinggapai oleh penjakit-penjakit jang sesat, asal kita tetap berdjalan diatas relnja Proklamasi, — Insja Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun akan atasi segala kesulitan jang akan mengadang, kita pun akan *ganjang* kesulitan jang akan menghalang!

Dengan tenang dan keteguhan hati kita harus *onderkennen* kesulitan-kesulitan jang mengadang itu dalam segala kewadjarannja sendiri-sendiri. Ada kesulitan jang memang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita dimasa jang lampau, oleh penjelèwèngan-penjelèwèngan, oleh ketololan-ketololan jang kita bikin sendiri. Ada kesulitan jang disebabkan oleh tidak tjukupnja modal mental-teknis-materiil dalam menghadapi persoalan-persoalan Revolusi. Dan ada kesulitan jang disebabkan oleh naiknja tingkatan penghidupan, oleh kemandjuaan jang telah kita tjapai.

Kesulitan golongan jang pertama harus kita atasi dengan koreksi segala kesalahan-kesalahan dizaman jang lampau. Kesulitan golongan kedua harus kita atasi dengan memperhebat usaha pemupukan modal mental-teknis-materiil. Kesulitan golongan ketiga harus kita atasi dengan mentjapai kemandjuaan jang lebih madju lagi! Ja, kemandjuaan dalam penghidupan masjarakat pun

membawa kesulitan ! Sedjuta anak bersekolah mendjadi 9 djuta anak bersekolah, itu mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu memakai lampu tjempor, sekarang memakai lampu tempel, malahan kadang-kadang memakai lampu stormking, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu berdjalan kaki, sekarang naik sepeda dan opelet, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan. Rakjat dulu 70 djuta jang naik kereta-api setiap tahun, sekarang 160 djuta naik kereta-api setiap tahun, itupun mendatangkan persoalan dan kesulitan !

Tetapi sebagai saja katakan tadi, dengan djiwa-besar marilah kita *ganjang* semua persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan itu. Kita bukan bangsa jang témpé, kita adalah Bangsa jang Besar, dengan Ambisi jang Besar, Tjita-tjita jang Besar, Daja-Kreatif jang Besar, Keuletan jang Besar. Kita sekarang dengan kembali kepada Undang-Undang-Dasar '45 sudah menemukan kembali Djiwa Revolusi, sudah mentjapai suatu *momentum mental*, jang memungkinkan kita bergerak madju terus dengan tjepat untuk mentjapai suatu momentum pula dibidang pembangunan-semesta untuk merealisasikan tjita-tjita sosial-ekonomis daripada Revolusi. Hantjur-leburlah segala rintangan dan kesulitan oleh geloranja momentum mental itu !

Sebab oleh tertjapainja momentum mental dengan kembali kita kepada Undang-Undang Proklamasi dan Djiwa Proklamasi itu, maka menghebatlah *Semangat Nasional* mendjadi *Kemauan Nasional* jang maha-sjakti, dan menghebat lagilah *Kemauan Nasional* itu melahirkan *Perbuatan-Perbuatan Nasional* jang membangun, dan menghantjur-leburkan segala rintangan dan segala kesulitan jang menghalangi djalan. Trilogi jang saja dengungkan tiga puluh tahun jang lalu, trilogi *nationale geest* menghebat mendjadi *nationale wil*, *nationale wil* menghebat mendjadi *nationale daad*, trilogi itu kini mendjelma mendjadi kenjataan, oleh tertjapainja momentum mental sedjak keluarnja Dekrit Presiden 5 Djuli 1959.

„Sekali lagi saja katakan”, demikianlah penutupan pidato saja dimuka Sidang Konstituante 22 April jang lalu, „— dan ini saja katakan untuk zelf-educatie kita sendiri —, kesulitan-kesulitan kita tidak akan lenjap dalam tempo satu malam. Kesulitan-kesulitan

kita hanja akan dapat kita atasi dengan keuletan seperti keuletannya orang jang mendaki gunung. Tetapi: Berbahagialah sesuatu bangsa, jang berani menghadapi kenjataan demikian itu! Berani menerima bahwa kesulitan-kesulitanja tidak akan lenjap dalam tempo satu malam, dan berani pula menjingkilkan lengan-badjunja untuk memetjahkan kesulitan-kesulitan itu dengan segenap tenaganja sendiri dan segenap ketjerdasannya sendiri. Sebab bangsa jang demikian itu, — bangsa jang berani menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu memetjahkan kesulitan-kesulitan —, bangsa jang demikian itu akan mendjadi bangsa jang gembléngan. Bangsa jang Besar, bangsa jang Hanjakrawarti-hambaudenda. Bangsa jang demikian itulah hendaknja Bangsa Indonesia!”

Ja, Bangsa jang demikian itulah hendaknja Bangsa Indonesia!

Maka gelorakanlah Semangat Nasionalmu! Gelorakanlah rangsang Kemauan Nasionalmu! Gelorakanlah rangsang Perbuatan-Perbuatan Nasionalmu! Dan, engkau, hai Bangsa Indonesia, betul-betul nanti mendjadi satu Bangsa jang Gembléngan!

Api nan tak kunjung padam



Biro Publikasi
Kementerian Penerangan